

**Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam
Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar
Perspektif Hukum Islam**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Syariah/Hukum Islam
Pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Mariani

Nim: 801001214010

Promotor/Kopromotor

Dr. Marilang, S.H., M>.Hum

Dr. Patimah, M.HI

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariani
NIM : 80101214010
Tempat/Tgl.Lahir : Kalempong, 10 Oktober 1989
Konsentrasi : Syari'ah/Hukum Islam
Program Studi : Dirasah Islamiyah
Alamat : Jl. Sutami Mandai No. 2-I Sudiang Makassar
Judul : Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam
Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar
Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R
Makassar, Maret 2017
Penyusun


Mariani
NIM. 80101214010

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”, yang disusun oleh Saudari Mariani NIM: 801001214010, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 29_03_2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01_07_1438 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Syariah/Hukum Islam pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.

()

KOPROMOTOR:

1. Dr. Patimah, M.HI.

()

PENGUJI:

1. Dr. Hamsir, M.H.
2. Dr. Hj. Rahmatiah HL., M.Pd.
3. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
4. Dr. Patimah, M.HI.

()
()
()
()

Makassar, Maret 2017

Diketahui oleh:
Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,

()
Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
NIP. 19361231 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji syukur bagi Allah swt. atas limpahan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Tentunya usaha ini dapat berhasil atas ridha Allah swt. Yang Maha Tahu, Maha Berkehendak terhadap sesuatu, baik yang lahir maupun batin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”, ini dimaksudkan untuk memenuhi salah-satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum, Konsentrasi Syariah/Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selesaiannya tesis ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada almarhum kedua orang tua tercinta: La Tamma dan Senong. Semoga jerih payah mereka yang telah mengasuh, membimbing serta tiada henti-hentinya memanjatkan do'a kehadiran Allah swt. untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Kepada almarhum nenek saya yang menghembuskan nafas terakhirnya beberapa menit pasca cucu bungsunya ini selesai melaksanakan ujian seminar hasil, semoga khusnul khotimah dan memperoleh ampunan Allah swt. Selanjutnya kepada Saudara,

Kerabat serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materinya dalam penulisan tesis dan juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Untuk maksud tersebut maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.A dan para Wakil Rektor. yang telah memimpin kampus UIN Alauddin Makassar tempat menimba ilmu pengetahuan;
2. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. sebagai Direktur yang telah memimpin Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan;
3. Dr. H. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I., sebagai Ketua Program Studi Syari'ah/Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan;
4. Dr. Marilang, M.H., sebagai promotor, dan Dr. Patimah, M.HI., sebagai Ko-promotor, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan koreksi dan bimbingan dengan baik serta senantiasa memberikan motivasi agar tesis ini dapat diselesaikan;
5. Para Guru Besar dan segenap dosen di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya kepada mahasiswa;
6. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Program Pascasarjana UIN Alauddin beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan untuk memperoleh literatur selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan tesis ini

7. Kepada Sang Guru sekaligus orang tua kedua penulis, Arianto Achmad, yang tiada bosan mendengar keluh kesah, memberikan nasehat dan petunjuk agar tidak lupa jalan menuju tujuan demi membangun peradaban menyambut Imam Zaman. Semoga beliau selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah swt. Amin.
8. Kepada calon Imam Dunia Akhirat penulis, Firman Patawari, M.Pd yang tiada hentinya memberikan dukungan, motivasi dan cinta kasihnya agar menyelesaikan tesis dan terus belajar agar menjadi guru yang baik untuk anak-anaknya kelak. Semoga niat baik kita segera terlaksana. Amin.
9. Kepada Prof. Anwar Borahima, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis untuk terus belajar dan mengembangkan karir. Semoga beliau selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah swt dan semakin sukses sebagai pengajar yang luar biasa. Amin.
10. Kepada atasan Penulis, Drs. H. L. Arumahi, M.H., yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan karir, semoga beliau selalu sehat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat dan semakin sukses kedepannya. Amin.
11. Kepada Keluarga Besar Human Illumination, semoga apa yang menjadi visi misi untuk menyambut sang Imam Zaman tercapai dan selalu dalam keberkahan Allah swt. Amin. Salam Peradaban.
12. Kepada Sahabat Terbaik penulis, Andi Dewi Sartika, S.H.; Khaerulnisa, S.H., M.H.; Indah Rezky Mulia, S.H.; Dina Dwi Noeryani, S.H.; Uslifah Chaerul, S.H.; Farscatya Romainum, S.H.; Farizah, S.H.; Muharlis, S.H; dan Andi

Kurniasari, S.H., M.Kn., kalian luar biasa. *I miss you all*. semoga kalian makin sukses dan yang belum nikah disegerakan. Amin.

13. Kepada sahabat dan teman-teman angkatan 2014 Konsentrasi Hukum Islam serta semua teman-temanku yang tidak penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini, semoga dapat menjadi amal ibadah disisi Allah swt. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga Allah swt. senantiasa meridhoi semua amal dan usaha yang dilaksanakan dengan baik dan penuh kesungguhan serta keikhlasan karena Allah swt.

Wabillahi Taufik wal hidayah. Ws....Wr...Wb.

Makassar, Maret 2017
Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Mariani
Nim: 80101214010

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : TINJUAN TEORITIS	
A. Pengertian LBH, Teori Peran dan Peran LBH.....	18
1. Pengertian LBH.....	18
2. Peran LBH.....	22
B. Teori-Teori Peran LBH.....	23
1. Teori Peran.....	23
2. Teori Hukum Islam tentang Peran LBH	25
3. Teori Hukum Konvensional tentang Peran LBH.....	31
C. Hak-Hak Perempuan Yang Diceritakan.....	36

D. Kerangka Pikir.....	46
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	47
B. Pendekatan penelitian.....	48
C. Sumber data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
G. Pengujian keabsahan data.....	52
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Selayang Pandang LBH APIK.....	55
B. Substansi Peran LBH APIK	66
1. Mewakili Klien.....	68
2. Membela Klien.....	70
3. Mendampingi Klien.....	71
4. Menegakkan Hukum dan Keadilan.....	72
C. Bentuk Bantuan LBH APIK Makassar dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan yang Bercerai.....	74
1. Litigasi.....	74
2. Semi Litigasi.....	75
3. Non-Litigasi.....	76
D. Hak-Hak Perempuan yang Diwujudkan LBH APIK Makassar...	77
1. Nafkah Iddah.....	77
2. Kishwah.....	81
3. Maskan.....	82
4. Nafkah Lampau.....	82
5. Nafkah Mut'ah.....	84
6. Hak Asuh Anak.....	83

7. Mewakili Hak Anak.....	91
8. Harta Bersama.....	92

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Implikasi Penelitian.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Perceraian Se-Kota Makassar	97
Tabel 2: Jumlah Gugatan Hak-Hak Yang Diperjuangkan Perempuan Se-Kota Makassar	98
Tabel 3: Jumlah Hak-Hak Perempuan Yang Diperjuangkan LBH APIK Makassar	99
Tabel 4: Jumlah Hak-Hak Perempuan Yang Dikabulkan PA Makassar se- kota Makassar	100
Tabel 5: Jumlah Hak-Hak Perempuan Yang Diperjuangkan PA Makassar Atas Perjuangan Makassar	101



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Jumlah Kasus LBH APIK Makassar	62
Grafik 2 : Jumlah Kasus LBH APIK Makassar Tahun 2015.....	63



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
وُ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِم : *nu“ima*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِي : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *di>>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i 'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

swt. = *subh}a>nahu> wa ta'a>la>*

saw. = *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sala>m*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Mariani
Nim : 801001214010
Program Studi : Dirasah Islamiyah
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Proposal Tesis : Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam

Tesis ini membahas mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam, Pokok masalah dalam tesis ini adalah: (1) Apakah peran LBH APIK menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Bantuan Hukum? (2) Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK menurut Hukum Islam dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di kota Makassar? (3) Sejauhmana hak-hak perempuan yang telah bercerai menurut Hukum Islam telah diwujudkan atas bantuan LBH APIK di kota Makassar?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai telah sesuai dengan hukum Islam; (2) Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai sehingga sesuai dengan hukum Islam; (3) Sejauhmana hak-hak perempuan yang bercerai telah terpenuhi menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, kemudian Lokasi yang dijadikan sampel penelitian adalah Kota Makassar yang difokuskan di Kantor LBH APIK Makassar dan beberapa warga masyarakat (perempuan) yang telah diceraikan di Kota Makassar serta Hakim Pengadilan Kota Makassar, adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologi hukum. Adapun metode dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian pedoman wawancara dan pedoman observasi, setelah data dikumpulkan kemudian di Analisis dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dan Pengujian Keabsahan Data melalui Kredibilitas, Defendabilitas, Konfirmabilitas dan Transpareabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan Hak-Hak Perempuan yang telah bercerai menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan Hukum; 2) Bentuk peran LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di kota Makassar yaitu : Litigasi, Semi Litigasi, dan *Non-Litigasi*, 3. Hak-Hak yang telah bercerai diperjuangkan LBH APIK di kota Makassar yaitu: Nafkah Iddah, Nafkah lampau, Nafkah Mut'ah, Nafkah Kiswah, *Hadanah*/Hak Asuh Anak, Mewakili Hak Anak, dan Harta bersama. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah diharapkan mengatur lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti nominal nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami sebagai dasar hakim menetapkan putusan. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga harus mengatur bahwa setiap nominal yang dikabulkan oleh hakim wajib dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri, jika tidak membayar akan diberikan sanksi.

ABSTRACT

Name : Mariani
Student's Reg. No. : 80101214010
Study Program : Islamic Education
Concentration : Islamic Law
Title of Thesis Proposal : The Role of APIK Legal Aid Institution in Fighting for Women's Rights in Makassar: A Perspective of Islamic Law

The study discussed the Role of APIK Legal Aid Institution in Fighting for Women's Rights in Makassar: A Perspective of Islamic Law. The main problems of the study were: (1) have the role LBH APIK under the Islamic law been accommodated in the legislation governing the Legal Aid Institutions? (2) what forms of assistance of LBH APIK under the Islamic law in fighting for divorced women's rights in Makassar? (3) to what extent have divorced women's rights under the Islamic law been realized by the assistance of LBH APIK Makassar? The aims of the study were to determine (1) whether the legislation governing the role of LBH APIK in fighting for the divorced women's rights was in accordance with the Islamic law; (2) the forms of LBH APIK assistance in fighting for the divorced women's rights that complied with the Islamic law; (3) the extent the divorced women's rights had been realized according to the Islamic law.

The study was qualitative research situated in Makassar focused on the Office of LBH APIK Makassar and some members of the community (divorced women) in Makassar as well as the Court Judges of Makassar, while the approaches employed were normative theology and sociology of law. The methods of collecting data were interview and documentation, and using interview and observation guidelines as research instruments. The collected data were analyzed through three stages of data reduction, data presentation and data verification or drawing conclusion which then tested the data validity through credibility, dependability, conformability and transparentability.

The study results revealed that 1) the role of LBH APIK Makassar in fighting for the divorced women's rights under the Islamic law had been accommodated into the legislation governing the legal aid; 2) the forms of LBH APIK Makassar role in fighting for the rights of divorced women in Makassar were: litigation, semi litigation and non-litigation, 3) the rights of divorced women that LBH APIK Makassar fought for were: *iddah* living, past living, *mut'ah* living, *kiswah* living, *hadanah*/child custody, representing child's rights, and common property. The implication of the study was expected for the government to set clearer legislation on the nominal income to be provided by the ex-husband as the basis for the judge to set the verdict. In addition, the legislation also provided that any nominal granted by the judge must be paid by the ex-husband to his ex-wife and it would be punished when failed to do so.

M A K A S S A R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subyek hukum, guna menjamin adanya penegakan hukum. Ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara gratis. Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara gratis yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.¹ Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau finansial. Hal ini diatur juga

¹Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 96

di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Selanjutnya jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.³ Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan

²Lihat Bab I tentang Ketentuan umum dan Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

³Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁴ Aturan di atas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberi bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁵

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.⁶

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalāh fī al-khuṣūmah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁷

Selain itu, dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum. Akan

⁴Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

⁵Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁶Didi kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2012), h. 29

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 55.

tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah swt, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum *syara'* (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.⁸

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS al-Kahfi/18:

19

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Terjemahannya:

“Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu,

⁸Didi kunsadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 29-30

dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”⁹

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, jumhur ulama membolehkan menggunakan perwakilan dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya, seperti karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.¹⁰

Selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hukum Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Dimana konsekuensinya saling berhubungan dan akan timbul perkara atau sengketa yang penyelesaiannya memerlukan bantuan untuk dapat menyelesaikannya. Allah swt berfirman dalam QS al-Mā'idah/3: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordova* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 503

¹⁰ Didi kusunadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 41

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ayat di atas menegaskan bahwa memberikan bantuan hukum kepada orang yang memerlukan sangat dianjurkan oleh agama, selama pemberian bantuan hukum tersebut masih mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama.

Meski dinyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, namun Islam tidak serta merta menyatakan bahwa wanita adalah warga kelas dua atau derajatnya dibawah laki-laki. Allah berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordova*, h. 215.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.¹²

Ayat di atas membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki. Keduanya sama-sama berpeluang untuk mencapai derajat keimanan dan keislaman yang tertinggi. Keduanya sama-sama berkesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah atas berbagai kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka juga sama-sama berkesempatan untuk mendapatkan surga, pahala, dan kenikmatan yang tidak terputus. Yakni jika keduanya sama-sama beriman, taat dan rajin beribadah, jujur dalam segala ucapan dan perbuatan, serta mengerjakan amal-amal shalih yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh larangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.¹³

Islam bukanlah agama yang bias gender, sejak Islam datang dimulailah proses pemulihan posisi dan citra perempuan. Allah memerintahkan kepada manusia agar bersikap baik pada perempuan, Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4 :19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordova*, h. 305.

¹³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 981

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan perlakukanlah mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan”.¹⁴

Pada zaman sekarang, pendidikan sudah maju, perempuan sudah terpelajar, namun masih saja banyak kasus yang menimpa perempuan baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam kehidupan masyarakat secara luas. Banyak perempuan tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya seperti; tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin, dianiaya, ditinggal pergi tanpa keterangan, dan yang juga menyedihkan adalah banyak perempuan yang bekerja seperti laki-laki dengan hasil yang sangat rendah. Bahkan banyak pula yang menjadi kuli bangunan, mengangkat pasir dari sungai, dan sebagainya.

Selain itu, diantara hak-hak istri atas suaminya salah satu haknya adalah mendapatkan nafkah dari suaminya sesuai dengan kondisi ekonomi, baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Nafkah tersebut meliputi; pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Allah berfirman dalam QS al-Thalaq/65 : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”¹⁵.

Alih-alih mendapatkan haknya, bahan kekerasan bahkan kerap mereka dapatkan. Karena ketidakmampuan para perempuan menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangganya, mereka merasa tidak terpenuhi haknya. Namun, mereka tidak mampu menuntut hak mereka di pengadilan selain karena kurang pengetahuan tentang hukum, persoalan ketidakmampuan secara finansial menjadi salah satu faktor utama.

Selain itu, ketidakmampuan para perempuan menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangganya, mereka merasa tidak terpenuhi haknya., apalagi para perempuan yang ditalak/diceraikan oleh suami mereka. Dalam hal perempuan yang diceraikan oleh suami, banyak yang terjadi di masyarakat. Hal ini yang mesti menjadi perhatian para penegak hukum. Apakah para perempuan yang diceraikan mendapatkan haknya? Pada realitasnya, terkadang perempuan tetap memilih bertahan dalam ikatan rumahtangganya meski mendapatkan kekerasan namun karena persoalan finansial mereka yang bergantung pada suami. Namun, ada juga suami yang lebih memilih untuk menceraikan mereka dengan berbagai alasan.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) yang merupakan organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, social maupun budaya. Dimana LBH-APIK memiliki misi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan-laki-laki yang ditandai dengan

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordova*, h. 726.

cirri-ciri: tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi stereotyping, tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada salah satu pihak. Demi mencapai misi tersebut, LBH-APIK mewujudkannya dengan cara memberikan pembelaan hukum bagi perempuan di dalam dan luar pengadilan; melakukan penelitian, pengkajian atas kebijakan dan masalah hukum yang timbul; menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan berperspektif gender.¹⁶

LBH-APIK mewujudkannya keadilan dan berperspektif gender dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai, cenderung belum sepenuhnya terwujud/terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan pada peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah diceraikan di Kota Makassar perspektif hukum Islam. Adapun hak-hak yang dimaksud seperti harta bersama, nafkah iddah, nafkah sehari-hari, nafkah mut'ah dan hak asuh anak.

Untuk memperjelas maksud dalam judul penelitian ini maka perlu dikemukakan agar pembaca tidak keliru memahaminya. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Bantuan Hukum APIK

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan lebih banyak disebut dengan istilah LBH-APIK. LBH APIK

¹⁶<http://lbhapikmakassar.org/data-base/8-tentang-kami.html> diakses pada tanggal 4 September 2016

adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, social maupun budaya. Tujuan ini hendaknya dicapai dengan mewujudkan system hukum yang berperspektif perempuan yaitu laki-laki dengan terus-menerus berupaya menghapuskan ketidakadilan, dalam bentuk marginalisasi (peminggiran secara ekonomi), subordinasi (peminggiran dalam hubungan kekuasaan), *stereotype* (pembakuan peran), kekerasan fisik, mental atau seksual dan beban berlebih pada satu pihak.¹⁷

b. Hak-Hak Perempuan yang Bercerai

Hak-hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana manusia terdiri dari 2 (dua) jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Dalam tesis ini akan diurai tentang hak-hak perempuan sebagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berdasarkan Hukum Islam dengan merujuk al-Qur'an dan hadist. Sesuai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena kematian perceraian atau keputusan pengadilan. Kemudian Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Oleh karena itu, perempuan yang bercerai dimaksud dalam penelitian ini yaitu perempuan yang telah ditalak oleh mantan suami atau mantan suami yang memiliki kehendak untuk bercerai atau berdasarkan putusan pengadilan bahwa pihak suami yang menjadi penggugat dalam

¹⁷<http://lbhapikmakassar.org/tentang-kami.html> di akses pada tanggal 9 September 2016

permohonan talak dipengadilan sehingga keluarnya putusan pengadilan. Adapun hak-hak yang dimaksud seperti harta bersama, nafkah iddah, nafkah sehari-hari, nafkah mut'ah dan hak asuh anak.

Dari definisi-definisi di atas, maka dalam karya ilmiah ini akan fokus membahas tentang perjuangan LBH APIK dalam mewujudkan hak-hak perempuan yang diceraikan. Sebagaimana peranan LBH APIK selama ini cenderung belum sesuai dengan hukum Islam sehingga perlu dilakukan penelitian lebih dalam. Hak-hak perempuan yang dimaksud adalah hak-hak para mantan istri yang bercerai karena kehendak mantan suami.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Deskripsi fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan penelitian. Deskripsi fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah peraturan peundang-undangan yang mengatur tentang peranan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai telah sesuai dengan hukum Islam;
- b. Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai sehingga sesuai dengan hukum Islam;
- c. Sejauh mana hak-hak perempuan yang bercerai telah terpenuhi menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran LBH APIK menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Bantuan Hukum?
2. Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK menurut Hukum Islam dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di kota Makassar?
3. Sejauhmana hak-hak perempuan yang telah bercerai menurut Hukum Islam telah diwujudkan atas bantuan LBH APIK di kota Makassar?

D. Kajian Pustaka

Penyusunan sebuah karya ilmiah, diperlukan berbagai dukungan teori dan penulisan terdahulu yang relevan sebagai rujukan terhadap penulisan yang hendak disusun, dalam hal ini yang terkait dengan Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.

Berikut ini akan akan dipaparkan secara singkat literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun buku yang berhubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Hak-Hak Perempuan antara lain:

Pertama, *Bantuan Hukum dalam Islam* karya, Didi Kusnadi. Buku ini memaparkan dengan rinci bantuan hukum dalam islam. Dalam buku ini dibahas mengenai hak-hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis

dengan didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu bantuan hukum menjadi bagian dari hak asasi manusia.¹⁸

Kedua, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan dengan Tim Penulisnya adalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati. Buku ini memaparkan bahwa banyaknya aspek yang membuat institusi perkawinan banyak yang menjadi kasus ke Pengadilan Agama sebagai kasus perceraian. Berbagai alasan memicu perceraian salah satunya karena kekerasan dalam rumah tangga yang berefek pada sulitnya terpenuhi hak-hak perempuan.¹⁹

Ketiga, *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran tentang Konflik dan Bantuan hukum Struktural)* Karya LBH Jakarta yang ditulis oleh Alghifari Aqsa, Dadang Trisasongko, Deonato De Piedade Moreira, Febi Yonesta, Hardin Halidin, Johari Efendi, Mustiqal Syah Putra, dan Syamsul Alam Agus. Buku ini memaparkan perspektif dan peran strategis bantuan hukum. Selain itu, melalui analisis dan pendekatan Bantuan Hukum Struktural penulis mencoba memaparkan bahwa ada aktifitas lain yang harus ditempuh selain sekedar member bantuan hukum melalui proses peradilan. Aktifitas bantuan tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, penguatan pengetahuan hukum dari komunitas yang bersangkutan, penelitian, kampanye, dan hal-hal lain yang dapat mendukung terjadinya penyelesaian konflik atau masalah.²⁰

¹⁸Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2012)

¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cet. II, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013)

²⁰Alghifari Aqsa, dkk., *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran tentang Konflik dan Bantuan hukum Struktural)* (Jakarta: LBH Jakarta, 2015)

Keempat, *Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender* disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sub Komisi Reformasi Hukum Kebijakan. Buku ini memaparkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum APIK merupakan salah satu lembaga yang bermitra dengan Komnas Perempuan dan bersama-sama dengan aparat penegak hukum serta masyarakat melakukan berbagai upaya mendorong terwujudnya keadilan terutama bagi perempuan korban kekerasan. Salah satu yang diperjuangkan untuk terwujudnya keadilan bagi korban.

Kelima, *Hukum Perceraian* karya Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. Buku ini memaparkan bahwa hak-hak mantan istri terhadap mantan suami akibat perceraian seperti harta bersama dan hak mantan istri mendapatkan biaya penghidupan dari mantan suami selama masa iddah.²¹

Keenam, *Hukum Perkawinan di Indonesia* karya MR Martiman Prodjohamidjojo. Buku ini memaparkan bahwa apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu kawin lagi dengan pria lain. Begitupun dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini harus dibagi dua antara suami dan istri apabila mereka bercerai.²²

Ketujuh, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd yang diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq. Buku ini memaparkan secara rinci tentang hak-hak istri-istri yang diceraikan dalam hukum Islam.

²¹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

²²MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011)

Kedelapan, *Laporan Akhir Kependium tentang HAK-Hak Perempuan*, Karya Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM. Karya Ilmiah ini memaparkan bahwa putusnya hubungan perkawinan dibedakan antara permohonan talak (suami) dan gugatan cerai (istri). Perbedaan itu menyiratkan bahwa hak suami mengajukan permohonan secara sosial-kultural lebih dominan dalam proses perceraian ketimbang hak istri yang harus menggugat suaminya jika dia menginginkan perceraian. Selain itu, perbedaan jenis perceraian itu juga berimplikasi pada hak-hak perempuan pasca perceraian. Umpama, dalam kasus gugatan, mantan istri tidak mendapat nafkah iddahnya, dan dia harus membayar sejenis ganti rugi kepada mantan suami. Konsep ganti rugi kepada mantan suami dan nafkah pasca perceraian sangat kental dengan budaya patriarkhal yang menempatkan suami sebagai kepala rumah-tangga dan *bread-winner*, serta memposisikan ketergantungan istri di bawah “kasih sayang” dan kebaikan suaminya. Lain dari itu waktu tunggu hanya berlaku bagi janda, bagi duda tidak berlaku waktu tunggu.²³

Berdasarkan kajian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah peraturan peundang-undangan yang mengatur tentang peranan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai telah sesuai dengan hukum Islam;

²³Komariah Emong Supardjaja, dkk., *Laporan Akhir Kependium tentang Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasionaldepartemen Hukum Dan HAM, 2007)

- b. Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai sehingga sesuai dengan hukum Islam;
- c. Sejauhmana hak-hak perempuan yang bercerai telah terpenuhi menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kajian-kajian Hukum Islam terutama menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya yang meneliti tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan adanya pemberian informasi yang konstruktif untuk dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan bagi masyarakat Makassar tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam perspektif Hukum Islam.

BAB II

TINJUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Peran LBH

1. Pengertian LBH

Menurut Ranuhandoko dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum sebagai *legal aid*.¹ Jika Bantuan hukum diartikan secara terpisah, bantuan berarti dana, derma, donasi, pemberian, santunan, sedekah, subsidi, sumbangan, tumpuan, pertolongan.² Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang, kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis; peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.³

Clarence J. Dias menggunakan istilah *legal service* dalam menyebutkan bantuan hukum yang diartikan dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum menurutnya adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi system hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi disiminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat. Pelayanan hukum digunakan Dias karena pelayanan hukum akan mencakupi kegiatan seperti pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat

¹I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 378

²Eko Endarmoko, *Thesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 56

³M.B. Ali dan T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2000), h. 267

diimplementasikan. Dias mengartikan bantuan hukum sebagai segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena tidak dimilikinya sumber daya financial yang cukup.⁴

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita, orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.⁵

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”⁶

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan;
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;

⁴Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2014) h. 468.

⁵T. Muliya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 9.

⁶Frans Hendra Winarta , *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: lex Media Komputindo, 2000), h. 23.

- d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.⁷

Adapun pengertian bantuan hukum menurut Abdurrahman adalah meliputi:⁸

- a. Memberi nasihat hukum di luar pengadilan
- b. Mewakili dan/atau mendampingi seseorang di muka pengadilan dalam perkara perdata
- c. Membela seseorang dalam perkara pidana

Menurut Zulaidi, bantuan hukum berasal dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistances*”. Istilah *legal aid* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu, sedangkan pengertian *legal assistances* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas baik pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.⁹

Dari berbagai pengertian maupun istilah yang telah disebutkan di atas, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang sering disebut dengan LBH Jakarta menyebutkan bahwa dalam perkembangan bantuan hukum, terdapat berbagai jenis bantuan hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. *Legal aid*, merupakan suatu pemberian jasa bantuan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu;

⁷Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, h. 23.

⁸Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), h.118.

⁹Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 468.

- b. *Legal assistance*, merupakan bantuan hukum kepada mereka yang mampu maupun tidak dengan memberikan honorarium;
- c. *Legal service*, merupakan suatu pelayanan hukum sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar beroperasinya hukum tidak diskriminatif akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumberdaya lainnya yang dikuasai individu dalam masyarakat;
- d. *A Legal Resources Approach* atau pendekatan sumberdaya hukum yang merupakan satu upaya pengembangan sumberdaya hukum masyarakat agar ada penguatan dalam masyarakat yang memungkinkan perwujudan dan perlindungan atas hak-hak mereka secara adil.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma disebutkan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁰

Pengertian bantuan hukum lebih ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan penerima bantuan hukum tersebut adalah

¹⁰Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

orang atau kelompok orang miskin.¹¹ Selanjutnya jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹² Adapun Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.¹³

Selain itu, jasa bantuan hukum tidak lepas dari peran advokat yang bertugas mewakili kepentingan hukum klien. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu.¹⁴

2. Peran LBH

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada

¹¹Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹²Lihat Bab I tentang Ketentuan umum dan Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹³Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁴Lihat pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

kecualinya.¹⁵ Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁶ Aturan di atas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberi bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁷

B. Teori-Teori Peran LBH

1. Teori Peran

Dalam jurnal yang ditulis oleh Lidya Agustina dengan judul Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor dengan menyebutkan pendapat Kahn bahwa teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku

¹⁵Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁶Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

¹⁷Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya.¹⁸

Lidya Agustina mengatakan bahwa Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem social.¹⁹

Menurut Sarwono dalam jurnal yang ditulis oleh Hermansyah dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung bahwa teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. menurut Hermansyah, dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu²⁰

Selanjutnya Sarwono menjelaskan bahwa Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran

¹⁸Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta)*, (Bandung: Jurnal Akuntansi Vol.1 No.1 Mei 2009: 40-69 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha , 2009). h.42.

¹⁹Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*. h.42.

²⁰Hermansyah, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*, (eJournal Pemerintahan Integratif, 2015).

merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran social.²¹

Seperti yang telah dijelaskan di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

2. Teori Hukum Islam tentang Peran LBH

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.²²

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalāh fī al-khuṣūmah*. Menurut

²¹Hermansyah, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*, (eJournal Pemerintahan Integratif, 2015).

²²Didi kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 29

Sayyid Sabiq, *al wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.²³

Selain itu, dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah swt, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum *syara'* (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.²⁴

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam perkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS al-Kahfi/18: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

²³Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 55.

²⁴Didi kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 29-30

Terjemahnya:

“Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”²⁵

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, jumhur ulama membolehkan menggunakan perwakilan dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya, seperti karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.²⁶

Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab *wakalah* seperti yang telah dijelaskan di atas. Meskipun diantara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum, mewakilkan atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordova* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 503

²⁶ Didi kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 41

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan *wakalah* artinya seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk menangani hal-hal yang dapat diwakilkan pelaksanaannya untuk dikerjakan oleh wakil selama pemberi *wakalah* masih hidup.²⁷

Adapun bantuan hukum dalam Islam yang terjadi pada masa Umar bin Khattab (632-644M). Pada masa Umar berkuasa, ia pernah memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yang mencuri. Umar berpendapat bahwa orang miskin yang mencuri tidak perlu dipotong tangan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah/3 :38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁸

Dalam hal ini Umar bin Khattab memberikan bantuan hukum kepada pelaku pencurian dengan berpendapat bahwa si pencuri tidak perlu dihukum potong tangan. Alasan hukum yang disampaikan oleh Umar bahwa saat ini bangsa kita dilanda musibah, yang disebut *'am al ramada* (musim kemarau panjang yang mengakibatkan tanah gersang sehingga rakyat kesulitan mencari makan). Kasus ini terjadi menjelang tahun 18 Hijriyah, dimana tanah-tanah menjadi gersang seperti di Hijaz, Tihama dan Najd.²⁹ Tindakan Khalifah Umar bin Khattab inilah yang dalam hukum Islam

²⁷Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (terj. Oleh Moch. Anwar, dkk., Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 883.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordova*, h. 309

²⁹Lihat selengkapnya dalam Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2002)

dimaksudkan sebagai bantuan hukum. Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak. Masalah tentang keadilan ini juga terdapat dalam petikan surat Umar Bin Khattab kepada Abdullah bin Qais atau Abu Musa Al-Asy'ari tentang masalah peradilan yang artinya disebutkan sebagai berikut:

“Sesungguhnya peradilan itu adalah fardhu yang dikukuhkan dan sunnah yang harus diikuti. Lalu, pamilah bila peradilan dibebankan padamu, karena sesungguhnya tiada bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa melaksanakannya. Samakan hak semua orang dihadapanmu, di dalam pengadilanmu dan di dalam majlisimu sehingga orang yang terpandang tidak menginginkan kecenderunganmu kepadanya dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu.....”³⁰

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan mengenai istilah bantuan hukum, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan (*al-qadha*), namun materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum. Bantuan hukum yang pelaksanaan yuridisnya dilakukan oleh *hakam* hanya dijumpai dalam bab *munakahat* (perkawinan). Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam, salah satunya yakni prinsip keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.³¹

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dikemukakan bahwa secara etimologi arti adil (*al-adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terjemah oleh Mudzakir A.S, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 29

³¹A.M Saefuddin dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 128-129

dengan yang lain (*al-musawah*). Sedangkan adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad 'asy-syai fi maqamih*).³² Disebutkan dalam QS al-Shad/38 :26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.”³³

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya berlaku adil karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal termasuk salah satunya dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai sarana penolong bagi kaum yang lemah. Selain itu prinsip kesamaan juga sebagai prinsip mendasar yang menjunjung penerapan bantuan hukum, dimana pada masa sekarang tidak ada perbedaan seperti pada masa jahiliyah, baik itu tuan dan budak, laki-laki dan perempuan ataupun si kaya dan si miskin semua berhak atas pembelaan dalam perkara pidana, salah satunya melalui program bantuan hukum.

³²Abdul Aziz Dahlan, et. Al (ed). *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 25.

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordova*, h. 704.

3. Teori Hukum Konvensional tentang Peran LBH

Di Indonesia, bantuan hukum berkembang sesuai dengan perkembangan sosial politiknya. Pada jaman kolonial hak atas bantuan hukum diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, akses bantuan hukum masih menggunakan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) hingga dicabut pada tahun 1981 dan digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu alasan mendasar pencabutan HIR adalah masih lemahnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan yang fair.³⁴

Namun demikian, dalam prakteknya akses bantuan hukum seluruh warga masih jauh dari kondisi ideal, bahkan pemerintah sendiri tidak memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai praktek kesewenang-wenangan hukum terhadap masyarakat miskin dan tertindas. Berdasarkan pengalaman empirik, pemberian bantuan hukum pada masyarakat, sumbangsih pemikiran dan konsep bantuan hukum yang lebih progresif dan kontekstual (tidak hanya sebagai pelayanan belaka) justru banyak dilakukan oleh actor-aktor non pemerintah.³⁵

Adnan Buyung Nasution sebagai salah seorang pendiri Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), mengatakan bahwa tujuan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH lebih Luas dan jelas. Disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, LBH berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina

³⁴Alghifari Aqsa, dkk., *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran tentang Konflik dan Bantuan hukum Struktural)*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2015), h. 4.

³⁵Alghifari Aqsa, dkk., *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran tentang Konflik dan Bantuan hukum Struktural)*, h. 5

kesadaran mengenai hak-hak sebagai subyek hukum, turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam rangka pembangunan nasional.³⁶

Terbentuknya PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) pada pertemuan advokat se-Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964 merupakan salah satu yang menjadi bukti bahwa bantuan hukum di Indonesia cukup berkembang. Frans mengungkapkan bahwa perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*, dan dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
- b. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab Negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban Negara juga untuk memberikannya.
- c. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa guna kepentingan pembelaan,

³⁶Alghifari Aqsa, dkk., *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran tentang Konflik dan Bantuan hukum Struktural)*, h. 5.

tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Bantuan hukum merupakan segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan, pembela sebagai pemberi bantuan hukum berperan sebagai pengontrol agar keputusan yang dijatuhkan pada kliennya oleh hakim adil dan tidak memihak. Konsep bantuan hukum yang dikenal sering diasosiasikan dengan orang yang kurang mampu. Konsep ini yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum, demikian rumusan undang-undang ini adalah orang atau kelompok miskin. Dengan kata lain, orang miskin adalah sasaran utama pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum disini merupakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang pada hukum konvensional berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut³⁷:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

³⁷http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

- b. Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- c. Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
- Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka
 - Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 237 bahwa Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cumacuma
- f. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum

- g. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH
- i. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A
- j. Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- k. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Seperti yang telah disebutkan beberapa aturan di atas bahwa penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi. Tidak mampu dalam hal ini yang dimaksud adalah mereka yang tidak mampu membayar jasa advokat sehingga negaralah yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak-hak dasar tersebut adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.³⁸

³⁸Lihat pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :³⁹

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hak-Hak Perempuan Yang Bekerja

Setiap perceraian memiliki akibat hukum terutama terhadap perempuan yang dicerai. Menurut Muhammad Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan member nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.⁴⁰

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hak-hak perempuan dalam perceraian yaitu:

1. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak;

³⁹Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁴⁰Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 400

2. Nafkah isteri;
3. Mut'ah (hadiah yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai kenang-kenangan) hakini khusus agama islam;
4. Nafkah anak;
5. Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.⁴¹

Adapun hak-hak perempuan yang bercerai yaitu sebagai berikut:

1. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami dan istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.⁴²

Menurut Subekti yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin harta bersama dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan pola hukum adat⁴³. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam empat golongan, sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.

⁴¹ Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 43

⁴² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 410

⁴³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 410

- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri pada waktu pernikahan.

2. Nafkah Iddah

Menurut Soemiyati, Iddah adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa iddah si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan lain-lain.⁴⁴ Adapun tujuan dan iddah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran jernih dan dingin diharapkan suami akan merujuk istrinya kembali dan begitu pula si istri diharapkan jangan menolak rujuk suaminya itu. Sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.
- b. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- c. Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.

Adapun iddah bagi istri yang bercerai dengan suami dengan jalan talak yaitu :⁴⁵

⁴⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 401

⁴⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 401

- a. Untuk istri yang diceraikan dalam keadaan mengandung, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.
- b. Istri yang masih mengalami haid (menstruasi), iddahnya tiga kali suci; termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai dengan ketentuan dalam QS al-Baqarah/2 : 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁶

- c. Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid iddahnya adalah tiga bulan. Sesuai dengan ketentuan dalam QS al-Talaq/65: 4 sebagai berikut:

⁴⁶ Lihat QS al-Baqarah/2 : 228

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁴⁷

- d. Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan agama sesuai QS al-Ahzab/33 :49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”⁴⁸

Sesuai dengan ketentuan tersebut, istri tidak perlu menjalani masa iddah. Apabila pada waktu akad nikah belum ditentukan berapa jumlah mas kawin yang akan diberikan

⁴⁷ Lihat QS al-Talaq/65: 4

⁴⁸ Lihat QS al-Ahzab/33 :49

kepadanya, maka suami mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri.

e. Perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talaq.

3. Nafkah sehari-hari

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti, perintah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menafkahi mantan istrinya ada pada pengadilan.

Lebih khusus lagi, aturan soal kewajiban mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menafkahi mantan istrinya tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pembagian gaji pada apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari

perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Jadi, kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Namun, apabila perceraian tersebut memang berasal dari kehendak istri, maka mantan istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Perlu diketahui juga bahwa walaupun suami yang meminta cerai, suami tidak perlu memberikan sebagian gajinya kepada bekas istrinya apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan/atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

4. Nafkah Mut'ah

Menurut Soemiyati, memberi mut'ah (memberikan untuk menggemirakan hati) kepada bekas istri. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁹

5. Hak Asuh Anak

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.⁵⁰

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi dua yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin

⁴⁹Lihat QS al-Baqarah/2:241

⁵⁰ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h.166

atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ditinjau dari hukum *fiqh*, pemeliharaan anak disebut *hadanah* yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama *fiqh* berpendapat bahwa wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. *Hadanah* atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian.

Dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian.

Ketentuan tersebut mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia 12 tahun anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madarat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 2) Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian memiliki korelasi erat dengan validasi perkawinan, dan validasi perceraian dari orang tuanya.
- 3) Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau hadanah”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil.
- 4) Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersama-sama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya.
- 5) Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, semata-mata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Ketentuan tersebut tentang *hadanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum *mumayiz* tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

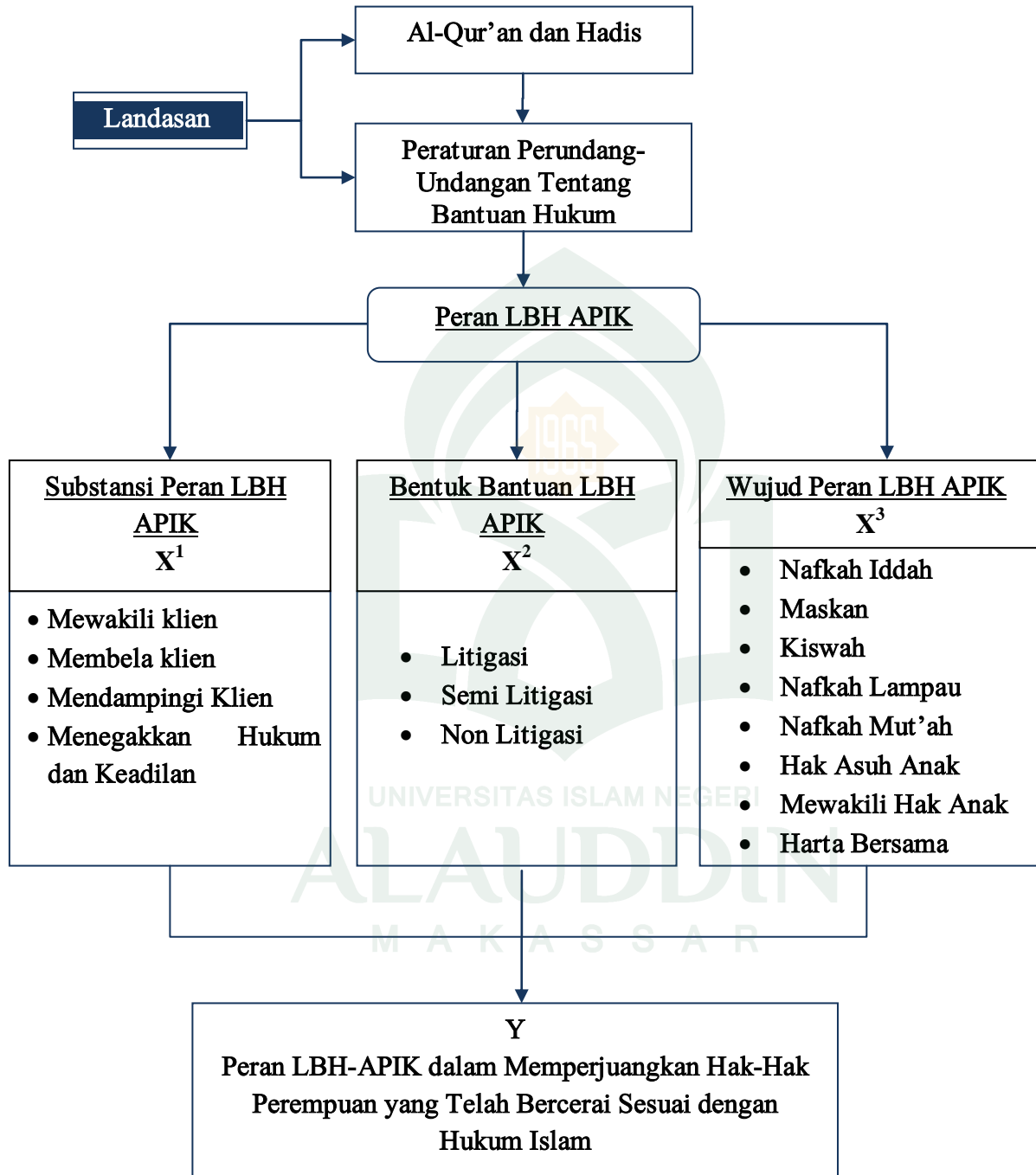
B. Kerangka Pikir

Tesis ini akan meneliti secara cermat Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK memperjuangkan hak-hak perempuan di Kota Makassar perspektif Hukum Islam. Berbagai masalah yang timbul seperti banyaknya terjadi perceraian yang mengakibatkan perempuan yang diceraikan tidak memperoleh hak-haknya sebagai mantan istri. Hal tersebut akan diteliti oleh penulis bagaimana LBH APIK Makassar memperjuangkan hak-hak perempuan di Kota Makassar. Terpenuhinya hak-hak perempuan merupakan tujuan agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang akan mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat. Seperti yang tertulis dalam *website* LBH APIK Makassar bahwa LBH APIK Makassar merupakan lembaga yang berupaya memberikan bantuan bagi kaum perempuan pencari keadilan yang lemah fisik, ekonomi maupun social-budaya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan social, non sectarian, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.⁵¹

Berdasarkan bangunan paradigma berfikir yang dijabarkan secara umum di atas, maka penulis dalam kerangka pikir tesis sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan analisis selanjutnya tertuang di bawah ini:

⁵¹<http://lbhapikmakassar.org/tentang-kami.html> diakses pada tanggal 9 September 2016

KERANGKA PIKIR



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan sikap, peran, persepsi, psikologi masyarakat secara alami. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong yang dikutip kembali oleh Aji Damanuri, M.E.I dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Mu'amalah* yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi mental bergantung dari pengaturan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²

Berdasarkan definisi penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research* kualitatif).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sampel penelitian adalah Kota Makassar yang difokuskan di Kantor LBH APIK Makassar dan beberapa warga masyarakat

¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PRESS PONOROGO, 2010), h. 23

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Cet. XXXI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4

(perempuan) yang telah diceraikan di Kota Makassar serta Hakim Pengadilan Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teologis Normatif

Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kehidupan beragama atau pelaksanaan norma-norma agama yang menjadi salah satu bagian dari pemenuhan hak-hak perempuan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana dalam penelitian normatif dengan pendekatan hukum islam menurut Aji Damanuri, harus merujuk pada al-Qur'an, al-Hadith dan kitab-kitab fiqh (pendapat para ulama).³

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan tujuan untuk membandingkan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan masalah yang diteliti berdasarkan fakta kondisi sosial yang melingkupi masalah perempuan di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan yang diceraikan di Pengadilan Agama Makassar dan LBH APIK sebagai pemberi bantuan hukum.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang

³Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, h. 48

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

dimaksud berupa hasil wawancara secara mendalam dengan informan dan tindakan yang merupakan hasil observasi⁵.

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah personil LBH APIK Makassar dan beberapa warga masyarakat (perempuan) yang telah diceraikan di Kota Makassar serta Hakim Pengadilan Kota Makassar. Sedang data sekunder peneliti akan mewawancarai narasumber lain yang berkompeten dan berupa dokumen yang dianggap penting dalam pelaksanaan penelitian ini yang berupa data tertulis.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah yang berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan wawancara. Teknik wawancara ini merupakan teknik yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.⁶ Esteberg yang dikutip oleh Sugiyono menerangkan bahwa wawancara dibedakan dalam tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang disusun secara terperinci mengenai hal hal yang ingin ditanyakan), wawancara semiterstruktur (dalam pelaksanaan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur) dan tidak terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang digunakan tidak tersusun secara

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

⁶Muhammad Tolchah hasan, et al., *Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 126-127.

sistematis, tapi hanya menurut pokok- pokok pikiran yang ditanyakan).⁷ Adapun yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, karena penulis hanya ingin menanyakan pokok-pokok pikiran saja, namun terfokus pada Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha aktif baik suatu badan atau lembaga dengan menyajikan hasil pengolahan baha-bahan dokumen yang bermanfaat bagi badan atau lembaga yang mengadakan. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berkaitan sejarah singkat tempat meneliti dan lain-lain.

E. *Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁸ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul tesis dengan menggunakan instrumen atau alat penelitian sebagai berikut:

1. *Human instrument*

Penulis sendiri sebagai human instrument, yakni berfungsi menetapkan fokus, variable penelitian, memilih informan yang akan diwawancarai sebagai salah satu sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai validitas dan kualitas data, menganalisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan.⁹

⁷Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 319-320.

⁸Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 148.

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 12.

2. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara dengan informan antara lain; buku catatan, tape recorder dan camera.¹⁰ Dalam penelitian ini, selain instrumen di atas, juga akan disiapkan daftar pertanyaan yang digunakan dalam melakukan wawancara.

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Setelah mendapatkan data- data dari sumber data primer dan sekunder selama masa penelitian, maka selanjutnya data- data tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Analisis data adalah suatu fase penelitian yang sangat penting, karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian- bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa lebih terang ditangkap maknanya.¹¹

Ada tiga tahapan dalam analisis data ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan lapangan.¹² Dalam tahap ini data kasar yang diperoleh di lapangan dipilih dan dikumpulkan agar data lebih sederhana dan mudah untuk diolah

¹⁰Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 328.

¹¹Djam'an Satori, et al., *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 97.

¹²Muhammad Ali dalam Yulmiati, Penerapan *Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik pada SD Islam Terpadu Wihdatul Ummah Makassar* (Tesis: Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012). h. 79.

2. Penyajian Data (*Data Display*) adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan.¹³ Pada tahap ini data yang telah direduksi dipilih kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kemudian mengorganisasikannya untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
3. Verifikasi Data atau penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif menjadi saripati jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi praktik dan pengembangan ilmu.¹⁴

Bagian ini merupakan bagian akhir analisis data yang akan memunculkan kesimpulan- kesimpulan yang akurat dan mendalam dari data hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam sebuah buku Metodologi Penulisan Kualitatif, disebutkan beberapa jenis pengujian keabsahan data dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kredibilitas

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep penulis dengan hasil penulisan. Kredibilitas

¹³Muhammad Ali dalam Yulmiati, *Penerapan Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik pada SD Islam Terpadu Wihdatul Ummah Makassar*. h. 79.

¹⁴Muhammad Ali dalam Yulmiati, *Penerapan Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik pada SD Islam Terpadu Wihdatul Ummah Makassar*, h. 80.

(derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Defendabilitas

Defendabilitas atau kebergantungan disebut juga audit menunjukkan bahwa penulisan memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data.

Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Audit dilakukan oleh independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penulis dalam melakukan penelitian.

3. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau kepastian adalah data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Dalam praktiknya, konsep konfirmabilitas dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/ tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi.

4. Transparebilitas

Transparebilitas atau keteralihan berkenaan dengan derajat akurasi, apakah hasil penulisan dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama.¹⁵

¹⁵ Djam'an Satori, et al., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, h. 164- 167.

Pengujian keabsahan data ini penting agar dapat dipastikan bahwa data hasil penelitian yang disimpulkan benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang LBH APIK

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan disingkat dengan LBH APIK Makassar didirikan pada tanggal 15 Desember 2001 dan diaktekan pada tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Soesanto Wibowo. Dikisahkan oleh Rosmiati Sain yang saat ini menjabat sebagai Direktur LBH APIK Makassar, bahwa asal muasal LBH Makassar didirikan yaitu, pada saat itu banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan dan membutuhkan bantuan hukum untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itulah LBH APIK didirikan di Kota Makassar.¹

Lebih lanjut Rosmiati Sain menjelaskan bahwa LBH APIK Makassar merupakan organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendaknya dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan terus-menerus berupaya menghapuskan ketidakadilan, dalam bentuk marginalisasi (peminggiran secara ekonomi), subordinasi (peminggiran dalam hubungan kekuasaan, *stereotype* (pembakuan peran), kekerasan secara fisik, mental atau seksual dan beban berlebih pada satu pihak.²

¹Rosmiati Sain (52 Tahun), Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 November 2016.

²Rosmiati Sain (52 Tahun), Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 November 2016.

LBH APIK Makassar didirikan pada tanggal 15 Desember 2001 dan diaktekan pada tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Soesanto Wibowo SH. LBH APIK Makassar adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendaknya dicapai dengan mewujudkan system hukum yang berperspektif perempuan yaitu system hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan – laki-laki dengan terus-menerus berupaya menghapuskan ketidakadilan, dalam bentuk marginalisasi (peminggiran secara ekonomi), subordinasi (peminggiran dalam hubungan kekuasaan, stereotype (pembakuan peran), kekerasan secara fisik, mental atau seksual dan beban berlebih pada satu pihak.

LBH APIK mempunyai jaringan seazas dimana Sekretariat Bersama dipusatkan di LBH APIK Jakarta. Dalam lingkup wilayah Indonesia, LBH APIK tersebar di 18 (delapan belas) provinsi di Indonesia dan salah satunya adalah LBH APIK Makassar. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan social, non sectarian, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH APIK Makassar berupaya memberikan bantuan bagi kaum perempuan pencari keadilan yang lemah secara fisik, ekonomi maupun sosial-budaya.

Menurut Rosmiati, LBH APIK mempunyai jaringan seazas dimana Sekretariat Bersama dipusatkan di LBH APIK Jakarta. Dalam lingkup wilayah Indonesia, LBH APIK tersebar di 18 (delapan belas) provinsi di Indonesia dan salah satunya berada di Makassar yaitu LBH APIK Makassar. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non *sectarian*, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH APIK Makassar berupaya

memberikan bantuan bagi kaum perempuan pencari keadilan yang lemah secara fisik, ekonomi maupun sosial-budaya.³

Seperti yang dijelaskan oleh Rosmiati LBH APIK memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan–laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Yang berdasarkan atas sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya manusia, perempuan dan laki-laki, sama derajat dan martabatnya dan saling membutuhkan satu sama lain. Adapun misi LBH APIK adalah Mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan-laki-laki yang ditandai dengan ciri-ciri: tidak terjadi marjinalisasi, tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi stereotyping, tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada salah satu pihak. Caranya dengan memberikan pembelaan hukum bagi perempuan di dalam dan luar pengadilan; melakukan peneliitan, pengkajian atas kebiakan dan masalah hukum yang timbul; menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan berperspektif gender.⁴

Beberapa aktivitas dan program kerja dari LBH APIK adalah sebagai berikut:⁵

1. Pelayanan hukum – konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan diluar dan didalam pengadilan bagi perempuan pencari keadilan dan kelompok rentan lainnya seperti; Penyandang Disabilitas, LGBTI, HIV/AIDS, dan korban ketidakadilan lainnya.

³Rosmiati Sain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, wawancara di Kantor LBH APIK pada tanggal 18 November 2016.

⁴ Rosmiati Sain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, wawancara di Kantor LBH APIK pada tanggal 18 November 2016, Selengkapnya <http://lbhapikmakassar.org/data-base/8-tentang-kami.html> diakses pada tanggal 3 Oktober

⁵<http://lbhapikmakassar.org/data-base/8-tentang-kami.html> diakses pada tanggal 3 Oktober

2. Pelatihan dan pendidikan masa – untuk para advokat, pengacara, buruh, mahasiswa, ibu RT, komunitas miskin kota/desa, paralegal khususnya perempuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang nilai-nilai hukum berkeadilan gender.
3. Kajian, publikasi informasi dan dokumentasi tentang:
 - a. Sistem hukum yang berakibat pada relasi gender
 - b. Penegakan hak-hak kaum perempuan dan informasi hukum tentang cara-cara menyelesaikan persoalan perempuan
 - c. Berita media masa-media elektronik, buku-buku dan bahan percetakan tentang hukum dan gender
4. Kampanye dan perubahan kebijakan – gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KDRT, kekerasan seksual, dan lain-lain).

Adapun program-program yang telah dilaksanakan oleh LBH APIK yaitu:⁶

1. Program Step By Step kerjasama LBH APIK Jakarta – The Asia Foundation, 2003.
2. Program Pendidikan Politik Perempuan Akar Rumput kerjasama FPMP Sulsel – UNDP – Uni Eropa – Partnership, 2004.
3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa dalam Menciptakan Otonomi Desa yang Berperspektif Gender di Kabupaten Takalar, 2004 – 2005.
4. Program Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Kecil dari Aspek Ekonomi, Hukum dan Politik di 5 (lima) Kabupaten/Kota, kerjasama dengan KL2SS dan NZAID, 2004-2008.
5. Program Pendidikan Politik dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Korupsi dan Dampaknya bagi Perempuan di Sulsel, 2005 – 2006.

⁶ <http://lbhapikmakassar.org/data-base/8-tentang-kami.html> diakses pada tanggal 3 Oktober

6. Program Legal Empowerment for Women dan Disadvantage Groups, kerjasama Asian Development Bank, The Asia Foundation dan Federasi APIK Indonesia, 2007
7. Program Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Kecil dari Aspek Ekonomi, Hukum dan Politik di 5 (lima) Kabupaten/Kota, kerjasama dengan KL2SS dan NZAID, 2004-2008.
8. Program Penanganan dan Pendampingan Korban Perdagangan Orang di Sulsel, kerjasama dengan ICMC Makassar, April 2008 – Juni 2009.
9. Program Pendidikan Paralegal, kerjasama Oxfam Novib – Federasi APIK Indonesia, 2009.
10. Program Peningkatan Pemahaman Publik atas Sistem Peradilan dan Akses pada Keadilan Gender di Sulsel, kerjasama Oxfam NZ, Februari 2009 – Februari 2010.
11. Program Peningkatan Kapasitas Paralegal, kerjasama Oxfam Novib – Federasi APIK Indonesia, Februari 2011.
12. Program Peningkatan Pemahaman Publik atas Sistem Peradilan dan Akses pada Keadilan Gender di Sulsel, kerjasama Oxfam NZ, Juli 2010 – Juni 2011.
13. Program Pemberdayaan Hukum Masyarakat untuk Akses pada Pelayanan Publik di Sulsel, kerjasama The Asia Foundation – Royal Netherlands Embassy, April 2009 – 2011.
14. Program Hukum, Sosial dan Ekonomi Perempuan dan Anak di Kota Makassar, kerjasama Oxfam NZ, Agustus 2011 – Juni 2012.

Sedangkan program yang sementara dilaksanakan oleh LBH APIK yaitu:⁷

⁷<http://lbhapikmakassar.org/data-base/8-tentang-kami.html> diakses pada tanggal 3 Oktober

1. Program We Can Campaign, kerjasama Oxfam Novib – LBH APIK Jakarta, 2009 – 2012.
2. Program Klinik Hukum E2J, kerjasama The Asia Foundation dengan USAID, Juni 2012 – Juni 2015.
3. Program Pemberdayaan Hukum dan Penanganan Kasus- Trafiking, kerjasama ACIL'S, 2012-2014.
4. Program Gender Justice di kota Makassar, kerjasama Oxfam Indonesia, 2012 – Des. 2013.
5. Program Riset-E2J kerjasama dengan Pusaka Medan tentang KDRT dan AKH, Juni – Desember 2013.
6. Program Penguatan Kapasitas Organisasi dan kelembagaan – Core funding – AIPJ - The Asia Foundation, Agust. 2013 – Des. 2014.
7. Program Mewujudkan Akses Perempuan atas Sistem peradilan & Keadilan Gender di Kota Makassar, September 2013- Juni 2014.

Saat ini LBH APIK Makassar dipimpin oleh Rosmiati Sain, sebagai Direktur menggantikan Lusia Palulungan. yang mengarahkan aktivitas dalam beberapa divisi dengan komposisi staf sebagai berikut:⁸

➤ Keuangan:

Sulastri

➤ Div. Pelayanan dan Bantuan Hukum:

Andi Nurhayati

Siti Nurfaida

Rocxy

⁸Rosmiati Sain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, wawancara di Kantor LBH APIK pada tanggal 18 November 2016.

➤ Div. Dokumentasi, Publikasi dan Informasi:

Bayu Lesmana

Ibnu Hajar

➤ Div. Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat:

Ir. Emma Rahmayanti

➤ Div. Kampanye dan Perubahan Kebijakan:

Jusmiati Lestari

➤ Voluntir:

Dra. Nuraeni

Syamsiah

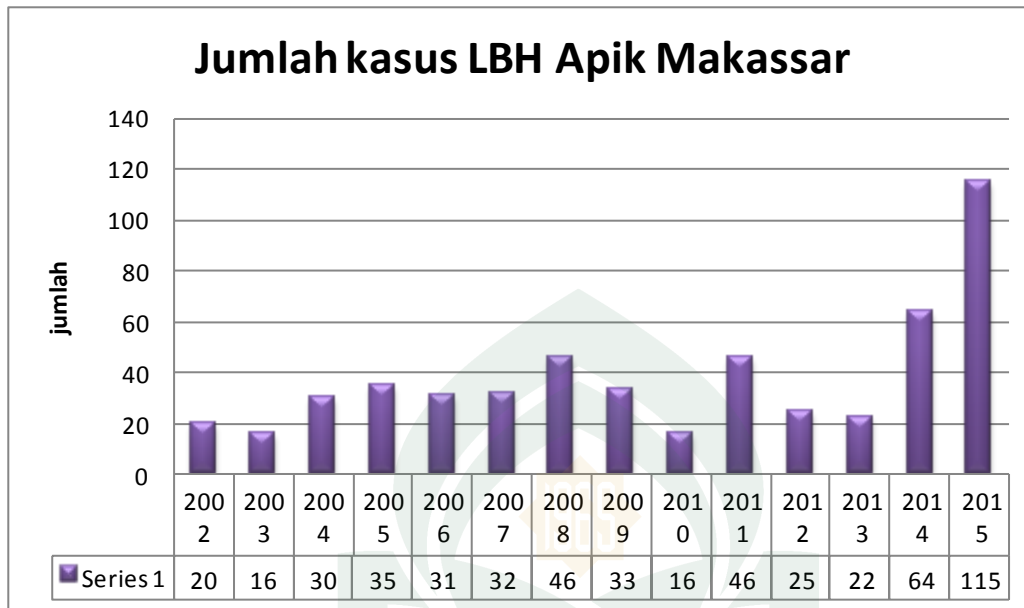
➤ Logistik:

Agustina

Adapun Paralegal yang diasuh oleh LBH APIK tersebar di 14 Kecamatan se-Kota Makassar yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Tamalanrea.⁹

⁹Rosmiati Sain (52 Tahun), Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 November 2016.

GRAFIK 1

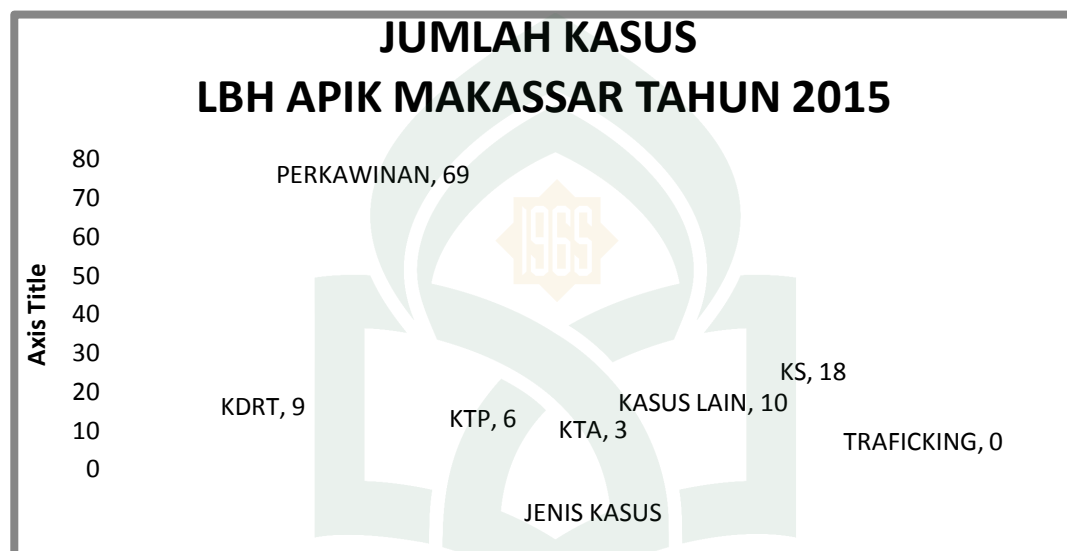


Sumber Data: Kantor LBH APIK Makassar

Data pada Grafik 1 menggambarkan jumlah kasus yang telah ditangani oleh LBH APIK Makassar sejak awal berdiri tahun 2002 hingga tahun 2015. Dimana pada tahun 2002 jumlah kasus yang ditangani LBH APIK Makassar sebanyak 20 kasus kemudian tahun 2003 berkurang sebanyak 16 kasus. Pada tahun 2004 dan 2005 bertambah yaitu tahun 2004 sebanyak dan tahun 2005 sebanyak 30 kasus. Sedangkan pada tahun 2006 sedikit berkurang 4 kasus dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 31 kasus. Selanjutnya pada tahun 2007 bertambah 1 kasus dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 32 kasus. Pada tahun 2008, kasus yang ditangani LBH APIK Makassar bertambah 14 kasus menjadi 46 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 berkurang 11 kasus menjadi 33 kasus. Pada tahun 2010, kasus yang ditangani LBH APIK Makassar berkurang dan kasus paling sedikit diantara tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berikutnya sampai tahun 2015 yaitu sebanyak 16 kasus. Pada tahun 2011, kasus yang ditangani LBH APIK Makassar kembali bertambah dan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 46 kasus. Pada tahun 2012, kembali berkurang sebanyak 21 kasus dibanding tahun sebelumnya sehingga kasus yang ditangani menjadi sebanyak 25 kasus. Begitupun pada tahun berikutnya sedikit berkurang yaitu tahun 2013 sebanyak 22 kasus. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali bertambah dan jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 64 kasus. Akhirnya pada tahun 2015, LBH APIK Makassar menangani kasus terbanyak selama berdirinya sejak tahun 2002 hingga 2015 dengan mencapai

jumlah sebanyak 115 kasus. dari jumlah kasus yang ditangani setiap tahunnya sejak 2002 hingga tahun 2015 LBH APIK telah menangani kasus sebanyak 531 kasus, kasus terbanyak pada tahun 2015 yang mncapai 115 kasus sedangkan kasus paling sedikit pada tahun 2003 dan 2010 sebanyak 13 kasus.

GRAFIK 2



Sumber Data: Kantor LBH APIK Makassar

Keterangan :

KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KTP : Kekerasan Terhadap Perempuan

KTA : Kekerasan Terhadap Anak

KS : Kekerasan Seksual

Data Pada Grafik 2 menggambarkan jumlah kasus berdasarkan jenis kasus yang ditangani oleh LBH APIK Makassar pada tahun 2015. Adapun kasus KDRT yang telah ditangani oleh LBH APIK Makassar sebanyak 9 kasus, kasus perkawinan sebanyak 69 kasus, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 6 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 3 kasus, kasus kekerasan seksual sebanyak 18 kasus, sedangkan kasus-kasus

lain sebanyak 10 kasus. Diantara kasus-kasus yang ditangani oleh LBH APIK Makassar, kasus perkawinan yang menjadi kasus terbanyak. Seperti yang dijelaskan oleh Rosmiati Sain bahwa pada jumlah kasus perkawinan yang ditangani oleh LBH APIK Makassar, perkara yang mendominasi adalah perkara perceraian. Perkara perceraian tersebut baik cerai gugat maupun cerai talak.

Khusus ditingkat Pengadilan Agama, bagi perempuan yang menjadikan cerai sebagai solusi bagi dirinya untuk keluar dari kekerasan, Hakim masih menganggap bahwa istri (perempuan) tidak patuh terhadap suami, dan perempuan malah yang dinasihati. Sementara di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar angka Kekerasan Terhadap Perempuan masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor Budaya Patriarki yang melekat pada masyarakat yang didukung oleh interpretasi orang yang keliru sehingga menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dan lebih cenderung mengalami kekerasan. Selain itu aturan hukum atau regulasi belum sepenuhnya berpihak pada perempuan dan terlebih lagi pada pengambil keputusan termasuk Aparat Penegak Hukum belum beperspektif korban (perempuan). Sehingga dapat terlihat kondisi riil sampai saat ini masih dialami perempuan, yakni masih rendahnya akses pada keadilan, sekalipun aktivis perempuan Indonesia secara khusus di Sulawesi Selatan aktif melakukan kampanye dan advokasi mengenai penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP).

Dari sekian kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) masih menduduki peringkat pertama dan LBH APIK Makassar¹⁰ bersama dengan Paralegal hingga tahun 2010 mencatat sebanyak 136 kasus dan tahun 2011 terdapat 98 kasus dan 2012 (hingga Juni) tercatat 33 kasus dan kasus

¹⁰Data Kasus yang ditangani LBH APIK Makassar bersama Paralegal 3 tahun terakhir (2010-Juni 2012)

KDRT masih menempati urutan pertama, artinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan dan diikuti dengan kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan yang juga cukup mengalami peningkatan hingga 3 bulan terakhir terutama kekerasan seksual yang korbannya perempuan yang masih dibawah umur.

Permasalahan yang sering dialami oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum:

- a. Perlakuan tidak adil (diskriminasi) di depan hukum dan Aparat Penegak Hukum.
- b. Pelabelan Negatif ketika mengalami masalah (menjadi korban).
- c. Kebijakan belum maksimal berpihak pada perempuan.

Apabila paralegal merasa kesulitan karena menganggap kasusnya berat, maka LBH APIK Makassar secara langsung mendampingi korban, baik sendiri maupun secara berjangkauan dan kadang melibatkan media supaya kasusnya bisa terekspos dan dibaca oleh publik. Untuk itu penting adanya kebijakan yang bisa digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan, terkhusus lagi untuk kekerasan seksual (Asusila) yang mana korban selalu dianggap sebagai pemicu terjadinya pelecehan seksual, perkosaan karena seksi, memakai rok mini dan lain-lain.

Khusus untuk korban KDRT, kesulitan untuk melaporkan kasusnya kadang menjadi kendala karena ketakutan oleh ancaman/intimidasi dari pelaku, sehingga seringkali korban menjadi korban yang kesekian kalinya. Padahal sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait perlindungan korban.¹¹ Perlindungan bagi korban seharusnya diberikan sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang

¹¹Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Artinya korban KDRT bisa mengadukan perkaranya ke Kepolisian, Pengadilan serta ke rumah sakit jika diperlukan *visum et repertum*¹² untuk keperluan persidangan ke pengadilan.

Selain itu khusus untuk korban yang akan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya sebagai upaya terakhir dan solusi keluar dari kekerasan. Untuk itu perlu juga diperhatikan hak-hak istri, baik berupa nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah setelah menjadi janda maupun tempat tinggal yang layak baginya dan anak-anaknya. Sehingga terkadang hak-hak tersebut menjadi tuntutan istri dalam gugatan dan diajukan di Pengadilan Agama baik secara langsung maupun oleh Tim Penasihat Hukumnya. Perlu juga diketahui bersama bahwa perceraian adalah solusi untuk keluar dari kekerasan, namun kekerasan yang dialami juga harus tetap diproses, apakah secara bersamaan atau secara terpisah.

B. Substansi Peran LBH APIK Makassar

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta

¹² *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan

wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.¹³ Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁴ Aturan di atas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberi bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁵

Sesuai dengan aturan di atas, Rosmiati Sain telah menjelaskan bahwa LBH APIK Makassar memberikan bantuan hukum kepada klien dengan gratis sebagai amanah undang-undang. Hal ini juga dibenarkan oleh semua klien yang telah diwanwancarai oleh penulis. Para klien menyebutkan bahwa, bantuan yang diberikan oleh LBH APIK Makassar sangat meringankan mereka karena tidak perlu

¹³Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁴Lihat Pasal 1ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

¹⁵Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

memngeluarkan biaya yang memberatkan mereka, dimana mereka kebanyakan dari kalangan kurang mampu.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa LBH APIK Makassar merupakan organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Adapun peran LBH APIK Makassar secara umum menurut Direktur LBH APIK Makassar, Rosmiati Sain yaitu:¹⁶

1. Mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak.
2. KDRT baik litigasi maupun Non litigasi
3. Perbandingan Hukum
4. Membentuk dan mengasuh Paralegal di 14 kecamatan yang tersebar di Kota Makassar dan berbagai Kabupaten di Sulawesi Selatan.

1. Mewakili Klien

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalāh fī al-khuṣūmah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.¹⁷

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam perkara terdapat dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS al-Kahfi/18: 19. Berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut, jumhur ulama membolehkan menggunakan

¹⁶Rosmiati Sain (52 Tahun), Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 November 2016.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 55.

perwakilan dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya, seperti karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.¹⁸

Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab *wakalah* seperti yang telah dijelaskan di atas. Meskipun diantara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum, mewakilkan atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan *wakalah* artinya seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk menangani hal-hal yang dapat diwakilkan pelaksanaannya untuk dikerjakan oleh wakil selama pemberi *wakalah* masih hidup.¹⁹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengatur tentang mewakili klien dalam proses hukum, LBH APIK Makassar memberikan bantuan hukum terhadap perempuan-perempuan yang diceraikan sesuai dengan Hukum Islam. Dalam hal ini, LBH APIK Makassar mewakili para klien yang tidak dapat hadir dalam proses penyelesaian kasusnya seperti kasus perceraian, LBH APIK mewakili klien dalam menghadiri proses persidangan. LBH APIK Makassar menghadiri persidangan. Baik

¹⁸Didi kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 41

¹⁹Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (terj. Oleh Moch. Anwar, dkk., Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 883.

dalam melakukan pendaftaran gugatan ataupun memenuhi panggilan persidangan. Hal tersebut dibenarkan oleh para klien diwakili jika klien tidak bisa hadir dalam proses persidangan.

Rosmiati menjelaskan bahwa LBH APIK tetap menjalankan bantuan-bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dari perpektif agama, LBH APIK menganut pluralisme. LBH APIK tidak memandang agama, jika klien atau korban yang mengadu ke LBH APIK beragama Islam, maka LBH APIK akan menempuh jalur-jalur hukum Islam. Seperti perceraian klien yang beragama Islam, maka didampingi ke Pengadilan Agama dengan dasar rujukan Kompilasi hukum Islam. Untuk kasus-kasus lain seperti KDRT, LBH APIK mendampingi klien ke kantor kepolisian sampai pada proses persidangan, hingga keluarnya putusan pengadilan.

Salah satu peran LBH APIK Makassar yang dikuasakan dalam menangani segala proses hukum seorang klien yaitu mewakili klien dalam persidangan. Jika klien tidak dapat hadir pada proses persidangan yang ditentukan oleh Pengadilan. Seperti pada tanggal 5 Desember 2016, salah satu klien dijadwalkan sidang pertama dalam proses perceraian. Dimana pada persidangan tersebut, klien dijadwalkan membacakan *rekonvensi* (jawaban permohonan talak). Dikarenakan klien sedang berhalangan untuk hadir, sehingga tim hukum LBH APIK Makassar hadir sebagai wakil yang dikuasakan oleh klien.²⁰

²⁰Dokumentasi terlampir

2. Membela klien

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan Hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum dalam istilah *literature* Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.²¹

LBH APIK Makassar memberikan bantuan dengan pembelaan terhadap kliennya yaitu melakukan segala sesuatu yang dapat membebaskan, meringankan, serta memudahkan klien dalam memperoleh hak-haknya. Setiap tindakan hukum yang ditempuh oleh LBH APIK Makassar adalah bentuk pembelaan hukum terhadap kasus hukum yang dilalui oleh klien. Seperti dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang diceraikan, LBH APIK Makassar selalu siap dan bersedia melakukan tindakan hukum demi memenuhi haknya. Dimulai dari pembuatan gugatan, kemudian mengajukan ke pengadilan, mengikuti proses persidangan dan sampai pada keluarnya putusan pengadilan.

3. Mendampingi Klien

Salah satu peran LBH APIK Makassar yang dikuasakan dalam menangani segala proses hukum seorang klien yaitu mendampingi klien dalam melakukan segala bentuk tindakan hukum. Seperti pada tanggal 24 November 2016, LBH APIK Makassar melakukan pendampingan hukum terhadap klien yang sedang menghadiri sidang pertama yang dijadwalkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar untuk

²¹Didi kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 29

pembacaan jawaban klien. Dimana klien pada pada persidangan tersebut menghadapi kasus perceraian. Klien dijadwalkan membacakan *rekonvensi* (jawaban permohonan talak) sebagai termohon dalam permohonan talak yang diajukan oleh suaminya. Dalam hal ini, klien membutuhkan bantuan dari LBH APIK Makassar dikarenakan klien tidak mengerti tentang proses-proses hukum yang harus ditempuhnya dalam memperjuangkan haknya sebagai istri yang diceraikan. LBH APIK Makassar hadir sebagai pendamping yang dikuasakan oleh klien.²²

4. Menegakkan Hukum dan Keadilan

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan Hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam.

Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam, salah satunya yakni prinsip keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.

Dalam QS Al-Shad/38 : 26, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya berlaku adil karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal, salah satunya termasuk dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai sarana penolong bagi kaum yang lemah. Selain itu prinsip kesamaan juga sebagai prinsip mendasar yang

²²Dokumentasi terlampir

menjunjung penerapan bantuan hukum, dimana pada masa sekarang tidak ada pembedaan seperti pada masa jahiliyah, baik itu tuan dan budak, laki-laki dan perempuan ataupun si kaya dan si miskin semua berhak atas pembelaan dalam perkara pidana, salah satunya melalui program bantuan hukum.

Selain itu, dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum. Akan tetapi, yang perlu digarispawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah swt, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum *syara'* (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.²³

Bantuan hukum yang telah dilakukan dan akan diupayakan oleh LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang diceraikan tetap berdasarkan aturan yang berlaku. Dimana bagi klien yang beragama islam, LBH APIK Makassar memperjuangkannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Hal tersebut merupakan peran LBH APIK Makassar yang dikuasakan untuk membantu klien menyelesaikan segala proses hukum dengan menegakkan hukum dan keadilan.

²³Didi kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 29-30

C. Bentuk Bantuan LBH APIK Makassar dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan yang Bercerai

Pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK Makassar kepada klien dalam hal ini adalah perempuan yang diceraikan, diberikan hingga masalah hukum yang dihadapi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama klien tidak mencabut surat kuasa khusus. Rosmiati Sain menjelaskan bahwa peran LBH APIK saat ini secara garis besar adalah salah satu organisasi bantuan hukum yang mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak. Selain secara langsung mendampingi perempuan-perempuan dalam ranah litigasi, juga mendampingi dalam ranah non-litigasi.²⁴ Adapun pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh LBH APIK Makassar yaitu dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari konsultasi, kemudian pembuatan gugatan/rekonvensi, pendaftaran/pengajuan gugatan, proses persidangan sampai keluarnya putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Makassar. Adapun bentuk bantuan LBH APIK Makassar yaitu sebagai berikut :

1. Litigasi

Litigasi merupakan persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.²⁵

²⁴Rosmiati Sain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, wawancara di Kantor LBH APIK pada tanggal 18 November 2016.

²⁵Lihat <http://unakunik.blogspot.co.id/2015/01/perbedaan-antara-litigasi-dan-non.html> dikunjungi pada tanggal 5 februari 2017, pukul 12.30 Wita.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan hukum yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat sebagai pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.²⁶

LBH APIK Makassar telah melaksanakan perannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang diceraikan dengan menempuh jalur litigasi.

2. Semi Litigasi

Semi Litigasi merupakan penyelesaian masalah sebelum masuk pada jalur litigasi yakni proses persidangan. Adapun yang penyelesaian perkara ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yaitu mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian masalah diluar peradilan. Dalam proses mediasi ada pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri masalah adalah para pihak. Pihak ketiga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, jika mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

²⁶Lihat <http://unakunik.blogspot.co.id/2015/01/perbedaan-antara-litigasi-dan-non.html> dikunjungi pada tanggal 5 februari 2017, pukul 12.30 Wita.

Ada dua tujuan mediasi, yaitu:

- a. Mediasi dilakukan agar perkara yang ditangani Mahkamah Agung tidak tidak menumpuk banyak di pengadilan, mengingat perkara yang masuk di pengadilan disetiap tahunnya mencapai ribuan.
- b. Sistem hukum semi litigasi dalam hal ini adalah mediasi sesuai dengan salah satu hukum di Indonesia yaitu hukum adat. Dimana dalam hukum adat, jika terjadi sebuah sengketa, maka dilakukan musyarah untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

LBH APIK Makassar melakukan perannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai di Kota Makassar dengan melakukan pendampingan kepada klien yang mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar sebelum masuk pada proses pengadilan. Selain itu, Rosmiati Sain juga mengungkapkan bahwa terkadang juga ada kasus yang ditangani LBH APIK Makassar yang menjadi mediator terhadap klien dengan mantan suami. Hal tersebut dilakukan jika klien atau keluarga klien meminta untuk dipertemukan dengan pihak suami.

3. *Non Litigasi*

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.²⁷ Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Adapun aturan tersebut yaitu sebagai berikut :

²⁷Lihat <http://unakunik.blogspot.co.id/2015/01/perbedaan-antara-litigasi-dan-non.html> dikunjungi pada tanggal 5 februari 2017, pukul 12.30 Wita.

- a. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui arbitase tetap diperbolehkan".²⁸
- b. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa "Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."²⁹

Pemberian bantuan hukum secara *non litigasi* meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum. Bentuk-bentuk bantuan tersebut diatas telah diberikan oleh LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan Hak-hak Perempuan yang diceraikan di Kota Makassar.

D. Hak-Hak Perempuan yang Diwujudkan LBH APIK Makassar

1. Nafkah Iddah

Secara etimologi kata “Nafkah” berasal dari bahasa Arab artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.³⁰ Bila seseorang dikatakan memberikan *Nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk

²⁸Lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

²⁹Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia* (Cet. XX; Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1449.

kepentingan orang lain. Namun apabila kata Nafaqah ini dihubungkan dengan Perkawinan mengandung arti: “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.³¹ Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.³² Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.³³

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.³⁴

Di antara dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam al-Qur'an adalah:

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/1: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, h. 1449.

³² H.S.A. Al Hamdani, *Risālah Nikāh*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 144.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 165.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 166.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{٣٥} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا^{٣٦} أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٣٧} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban Ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para Ibu dengan cara Ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁵

Yang dimaksud *Almawlūd* lah dalam ayat di atas ialah ayah, *Arrizq* maksudnya makanan secukupnya, *Kiswah* artinya pakaian. Sedangkan *al-Ma'rūf* artinya yang dikenal/baik menurut pengertian syara' tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan.³⁶

b. Al-Qur'an surat at-Ṭalāq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ^{٣٧} وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ^{٣٨} حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^{٣٩} فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^{٤٠}
وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ^{٤١} بِمَعْرُوفٍ^{٤٢} وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ^{٤٣} فَسْتَزِعْ لَهُ^{٤٤} أُخْرَى^{٤٥} ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkām* (Jakarta: Pena Qur'an, t.t.), h. 38.

³⁶H.S.A Al Hamdani, *Risālah Nikāh*, h.145.

(hati) mereka. dan jika mereka (Istri-istri yang sudah di ṭalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁷

c. Al-Qur'an surat at-Ṭalāq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi Nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi Nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³⁸

Adapun yang dimaksud di sini pemberian *nafaqah* untuk istri adalah demi memenuhi keperluannya (istri) berupa makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar pada umumnya. Sedangkan *iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungan berisi atau tidak.³⁹

Melihat definisi *nafaqah* dan *iddah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *nafaqah iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Dalam KHI pasal 149 huruf (b) juga dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib member

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 560.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 560.

³⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 414.

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya, bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqah*. *Nafaqah* disini yaitu belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan⁴⁰. Dalam hal ini, tentang pemberian nafkah iddah istri yang dalam gugatannya tidak meminta atau menuntut dan berpedoman pada pasal 178 HIR yakni “Hakim tidakizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”, selaku hukum formilnya. Tetapi walaupun tanpa dituntut hak nafkah tersebut melekat dengan sendirinya karena hak tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum materil yakni pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Jadi, nafkah iddah tersebut diminta atau tidak diminta pihak istri tetap harus diberikan, karena penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusannya pun harus mengikuti aturan khusus yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kiswah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Seperti diungkapkan Amir Syarifuddin bahwa kewajiban itu bukan disebabkan karena istri

⁴⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 166.

membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁴¹

Hal yang dilakukan oleh LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang diceraikan, baik perceraian yang dilakukan dengan cara gugat cerai maupun permohonan talak. Sebagaimana QS. Al-Baqarah/1: 233 yang menyebutkan kata “كِسْوَتُهُنَّ” yaitu yang dimaksud *kiswah* adalah artinya pakaian, maka LBH APIK Makassar memasukkan *kiswah* dalam gugatan maupun jawaban permohonan talak sebagai salah satu hak yang wajib diperjuangkan untuk perempuan yang diceraikan. Hal ini dikarenakan *kiswah* merupakan hak dari mantan istri baik pada masa perkawinan maupun masa iddah. *Kiswah* merupakan nafkah dalam bentuk pakaian, dimana suami wajib menjaga kehormatan istri yaitu aurat.

3. *Maskan*

Sebagaimana *kiswah*, *maskan* juga wajib diberikan suami kepada istri. Dalam al-Qur'an surah Ar-Rum/30:21 yang menjelaskan bahwa membentuk keluarga yang sakinah dalam arti agar suami atau istri cenderung dan merasa tentram. Sakinah sendiri berasal dari kata *maskan* yang artinya aman. Sehingga pemberian tempat tinggal sebagai bentuk tanggungjawab suami dengan tujuan keamanan kepada istri.

LBH APIK Makassar memasukkan *maskan* dalam gugatan maupun jawaban permohonan talak sebagai salah satu hak yang wajib diperjuangkan untuk perempuan yang diceraikan. Karena pemberian tempat tinggal sebagai bentuk tanggungjawab suami dengan tujuan keamanan kepada istri. Begitupun ketika suami menjatuhkan talak kepada istri, maka suami wajib bertanggungjawab atas keamanan istri yang akan diceraikan.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 166.

4. *Nafkah Lampau*

LBH APIK menuliskan nafkah lampau sebagai hal yang harus diperjuangkan oleh perempuan yang digugat cerai oleh suaminya, sebagai akibat kelalaian suami yang semena-mena kepada istri selama pernikahannya. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya kepada istrinya selama pernikahan maka nafkah lampau ini bisa dituntut.

Rosmiati menjelaskan nafkah lampau banyak diperjuangkan dengan menuangkan dalam jawaban permohonan talak yang diajukan suami. Nafkah lampau dalam Islam dikategorikan sama dengan nafkah suami kepada istri, yaitu kewajiban suami menafkahi istri selama masa perkawinan. Mengapa dimasukkan sebagai nafkah lampau, dikarenakan pada masa perkawinan, suami tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi nafkah istri, sehingga hal itu menjadi hak istri. Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara rinci masalah nafkah lampau, namun telah diatur bahwa suami berkewajiban memberi nafkah terhadap istri selama pernikahan. Nafkah lampau diperjuangkan ketika telah jatuh talak dikarenakan pada masa pernikahan beberapa suami tidak memberikan nafkah kepada istri sampai pada jatuhnya talak. Nominal jumlah nafkah ini dihitung sejak kapan suami tidak memberikan nafkah sampai pada jatuhnya putusan talak.

5. *Nafkah Mut'ah*

Nafkah *mut'ah* adalah hadiah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri secara sukarela. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Nafkah ini merupakan nafkah lahir.

LBH APIK Makassar memperjuangkan nafkah *mut'ah* karena merupakan hak istri yang diceraikan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴²

Dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang diceraikan, LBH APIK Makassar menuangkannya kedalam setiap gugatan cerai maupun rekonvensi yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Hal ini dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang mengatakan bahwa dalam LBH APIK Makassar memasukkan nafkah mut'ah dalam gugatan maupun jawaban permohonan talak yang dimana nafkah tersebut merupakan hak dari perempuan-perempuan yang dibela oleh LBH APIK Makassar. Begitupun dengan keterangan beberapa perempuan yang menjadi klien LBH APIK Makassar.

6. *Hadhanah/Hak Asuh Anak*

Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan.⁴³

Secara terminologis, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum *hadhanah* inihanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan,

⁴²Lihat QS al-Baqarah/2:241

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, *Fiqh assunnah* (Cet. VIII; Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), h. 173.

pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (*wilayah*).⁴⁴

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak:

1. Hak wanita yang mengasuh.
2. Hak anak yang diasuh.
3. Hak ayah atau orang yang menempati posisinya.

Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk menasuh anak.

Kedua, si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian. sebab mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, *Fiqh assunnah*, h. 173.

Ketiga, seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya yaitu ibu, lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang memperbolehkannya.

Keempat, jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Mengingat bahwa wanita lebih memahami dan lebih mampu mendidik, disamping lebih sabar, lebih lembut, lebih leluasa dan lebih sering berada bersama anak, maka ia lebih berhak mendidik dan mengasuh anak dibandingkan laki-laki. Hal ini berlangsung hanya pada usia-usia tertentu, namun pada fase-fase berikutnya laki-laki yang lebih mampu mendidik dan mengasuh anak dibandingkan wanita.

Ibu adalah wanita yang paling berhak mengasuh anak. Jika wanita lebih berhak mendidik dan mengasuh anak daripada laki-laki, maka sesuai ijma ulama, ibu kandung tentu lebih berhak mengasuh anaknya setelah terjadi perceraian antara suami dan istri, baik karena talak, meninggalnya suami atau suami menikah dengan wanita lain, karena ibu jauh memiliki kelembutan dan kasih sayang, kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh anak.

Ulama berbeda pendapat siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil *qath'i* yang secara tegas membahas masalah ini. Hanya saja ke-empat imam madzhab lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan dari kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek pihak ayah). Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah:

- 1) Ibu kandungnya sendiri
- 2) Nenek dari pihak ibu
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara perempuan (kakak perempuan)
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan saudara perempuan
- 7) Anak perempuan saudara laki-laki
- 8) Bibi dari pihak ayah

Kalangan Madzhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak anak asuh dimulai dari:

- 1) Ibu kandung
- 2) nenek dari pihak ibu
- 3) bibi dari pihak ibu
- 4) nenek dari pihak ayah
- 5) saudara perempuan
- 6) bibi dari pihak ayah
- 7) anak perempuan dari saudara laki-laki
- 8) penerima wasiat
- 9) dan kerabat lain (*ashabah*) yang lebih utama

Kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari:

- 1) Ibu kandung
- 2) nenek dari pihak ibu
- 3) nenek dari pihak ayah
- 4) saudara perempuan
- 5) bibi dari pihak ibu

- 6) anak perempuan dari saudara laki-laki
- 7) anak perempuan dari saudara perempuan
- 8) bibi dari pihak ayah
- 9) dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi sianak yang mendapatkan bagian warisan *ashabah* sesuai dengan urutan pembagian harta warisan. Pendapat Madzhab Syafi'i sama dengan pendapat madzhab Hanafi.

Kalangan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa:

- 1) ibu kandung
- 2) nenek dari pihak ibu
- 3) kakek dan ibu kakek
- 4) bibi dari kedua orang tua
- 5) saudara perempuan seibu
- 6) saudara perempuan seayah
- 7) bibi dari ibu kedua orangtua
- 8) bibinya ibu
- 9) bibinya ayah
- 10) bibinya ibu dari jalur ibu
- 11) bibinya ayah dari jalur ibu
- 12) bibinya ayah dari pihak ayah
- 13) anak perempuan dari saudara laki-laki
- 14) anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah
- 15) kemudian kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat.

Kalangan ahli fiqih menyebutkan sejumlah syarat untuk mendapatkan hak asuh anak yang harus dipenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuh anak hilang, syarat-syarat tersebut adalah:

Syarat pertama dan kedua, berakal dan telah baligh, sebab kelompok ini masih memerlukan orang yang dapat menjadi wali atau bahkan mengasuh mereka. Jika mereka masih membutuhkan wali dan membutuhkan pengasuh, maka mereka pun tidak pantas untuk menjadi pengasuh untuk orang lain.

Syarat kedua, Agama yang mengasuh haruslah sama dengan agama anak yang diasuh, sehingga orang kafir tidak berhak mengasuh anak Muslim. Hal ini didasarkan pada dua hal:

1. Orang yang mengasuh pasti sangat ingin anak yang diasuhnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. dan ini adalah bahaya terbesar yang dialami si anak. Dan telah dijelaskan dalam :“*psabda Rasulullah Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nashrani atau Majusi.*” (HR Bukhari dan Muslim) Hadits ini menunjukkan bahwa agama anak tidak aman jika diasuh oleh orang kafir.
2. Hak asuh anak itu sama dengan perwalian. Allah berfirman dalam QS An-Nisā’/4:141.

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁴⁵

Syarat ke empat, mampu mendidik, sehingga orang yang buta, sakit, terbelenggu dan hal-hal lain yang dapat membahayakan atau anak disia-siakan maka tidak berhak mengasuh anak.

Syarat kelima, ibu kandung belum menikah lagi dengan lelaki yang lain.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 101.

Jika si anak sudah tidak lagi memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari, telah mencapai usia *mumayyiz* dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum memakai pakaian dan lain-lainnya, maka masa pengasuhan telah selesai.

Jika kedua orang tua sepakat untuk mengikutkan anak tinggal bersama salah seorang dari kedua orang tua, maka kesepakatan ini dapat dilaksanakan. tetapi jika kedua orangtua masih berselisih, maka ada dua hal yang harus diperhatikan:

Pertama, anak yang diasuh adalah laki-laki. Terkait dengan anak laki-laki yang telah selesai masa pengasuhannya, muncul tiga pendapat dikalangan ulama:

1. Madzhab Hanafi, Ayah lebih berhak mengasuh si anak. Dengan alasan bahwa jika seorang anak laki-laki sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang ia butuhkan adalah pendidikan dan perilaku seorang laki-laki. Dalam hal ini si ayah lebih mampu dan lebih tepat.
2. Madzhab Maliki, Ibu lebih berhak selama si anak belum baligh.
3. Madzhab Asy-syafi'i dan Ahmad, Anak diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara keduanya.

Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa memberi kesempatan memilih dan mengundi hanya dapat dilakukan apabila kedua cara ini memberikan kemaslahatan bagi si anak. Kalau memang ibu dipandang lebih dapat melindungi anak dan lebih bermanfaat dibanding ayahnya, maka dalam kasus ini merawat anak harus didahulukan tanpa harus mempertimbangkan cara mengundi dan memilih.

Kedua, anak yang diasuh adalah anak perempuan. Para Ulama berbeda pendapat, Kalangan Madzhab Maliki berpendapat bahwa anak tetaptinggal bersama ibunya hingga anak perempuan tersebut menikah dan telah berhubungan intim dengan suaminya. Dengan mengacu padapendapat Imam Ahmad, kalangan madzhab Hanafi berpendapat

bahwa manakala telah mengalami menstruasi anak perempuan diserahkan kepada ayahnya. Kalangan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa anak diserahkan kepada ayahnya apabila telah mencapai usia 7 tahun.⁴⁶

Ketiga, Imam madzhab sepakat bahwa anak ini tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Sementara itu Syafi'i berpendapat bahwa perempuan diberi kesempatan menentukan pilihan seperti anak laki-laki dan dia berhak untuk hidup bersama orang yang menjadi pilihannya (ayahnya atau ibunya).

Ibnu Taimiyyah lebih memilih berpendapat bahwa anak perempuan tidak diberi kesempatan memilih. Ia bisa hidup bersama salah satu dari keduanya apabila orangtua yang ia ikuti ini taat kepada Allah dalam mendidik anak. (Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah).

Seperti yang telah diuraikan di atas, LBH APIK Makassar memperjuangkan Hak Asuh anak. Sama halnya dengan hak-hak perempuan yang diceraikan telah dijelaskan di atas, hak asuh anak juga diperjuangkan oleh LBH APIK Makassar. Hak asuh anak juga dituangkan kedalam gugatan maupun rekonsvensi bagi klien-klien yang memiliki anak dan mereka mampu. Mengapa dikatakan mampu, dikarenakan sebagian klien tidak mementingkan hal tersebut karena mereka merasa tidak mampu. Hak asuh anak, kadang menjadi gugatan tersendiri, jika dalam putusan perceraian tidak disebutkan tentang hak asuh anak jatuh kepada ibu, namun realitasnya tidak dibiarkan mengasuh bahkan bertemu dengan anak.

7. Mewakili Hak Anak

Adapun terkait nafkah anak, dikategorikan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Biaya Hidup merupakan segala kebutuhan hidup anak.

⁴⁶Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Cet. II; Bairut: Dār al-Kutub, al-Ilmiyah, 2005), h. 187.

- b. Biaya Pendidikan merupakan biaya pendidikan anak selama masih bergantung bersama ibunya kecuali, sudah memisahkan diri dengan ibunya dalam artinya sudah berumah tangga.

Dalam hal nafkah anak, LBH APIK Makassar juga menuangkan kedalam kedalam gugatan maupun rekonsiliasi bagi klien-klien yang memiliki anak. Namun kasus nafkah anak, diperjuangkan tersendiri jika dalam putusan sebelumnya yaitu putusan perceraian tidak dituangkan, maka dituangkan kedalam gugatan tersendiri. menurut LBH APIK Makassar, kasus hak asuh anak dengan nafkah anak menyatu. dimana hak asuh anak jatuh kepada ibu jika masih berumur 12 tahun kebawah. Jika anak telah berumur 12 tahun keatas, anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal dengan ibu atau ayah. Untuk nafkah anak diminta oleh LBH APIK Makassar sesuai permintaan klien, jika dalam putusan sebelumnya tidak disebutkan. Jika telah disebutkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu, maka nafkah anak ditanggung oleh ibu. Namun jika ibu tidak mampu dan tidak disebutkan dalam putusan, maka mantan suami selaku ayah berkewajiban memberikan nafkah berupa biaya hidup anak hingga umur 22 tahun atau setelah menikah.

8. *Harta bersama*

Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para istri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama atau yang biasa juga disebut harta bersama. Dan banyak yang mengalami ketidakadilan, seperti yang diungkapkan oleh klien LBH APIK Makassar selaku korban ketidakadilan tentang harta bersama bahwa yang bersangkutan sejak awal menikah sampai sekarang nafkah yang diberikan mantan suami dapat dihitung. Untuk itu, yang bersangkutan memperjuangkan dengan bantuan LBH APIK Makassar. Karena

menurutnya, yang berhak mendapatkan sebagian karena digunakan untuk melanjutkan hidup dengan anak-anaknya.⁴⁷

Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak istri maupun suami berhak atas separuh dari harta bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan biasa disebut harta bawaan, tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya, harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama.

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam membuat kesepakatan harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan, intimidasi dan ancaman. Jika tidak mendapatkan kesepakatan yang adil, sedikitnya memperoleh separuh bagian harta bersama sesuai hukum yang berlaku. Agar tidak terjadi masalah dikemudian hari terkait harta bersama,

⁴⁷Pengguna Jasa LBH APIK (39 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Makassar, 13 Desember 2016.

membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan diantaranya :

1. Ketentuan pembagian harta bersama termasuk prosentase pembagian harta bersama jika terjadi perceraian;
2. Pengaturan atau penanganan urusan keuangan keluarga selama perkawinan berlangsung;
3. Pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, artinya harta yang anda peroleh dan harta suami terpisah sama sekali.

Membuat perjanjian perkawinan adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Dalam perjanjian perkawinan juga dapat diatur ketentuan bahwa jika terjadi perceraian, istri berhak mendapatkan prosentase lebih dari separuh bagian apabila istri tidak bekerja, dilarang bekerja, menanggung beban ganda, menanggung beban perwalian anak, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sebagainya. Jika tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, istri dapat melakukan musyawarah mengenai besarnya pembagian harta bersama yang akan diterima.

Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat di bawah tangan tetapi disahkan oleh notaris dan dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan. Pada saat perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Islam, perjanjian perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Bagi yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian atau dapat juga diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Istri dapat memilih prosedur mana yang sesuai dengan kepentingan. Perlu diketahui, jika pasangan setuju bercerai tetapi tidak setuju dengan

pembagian harta bersama, putusan cerai bisa terhambat. Jadi, jika menghendaki putusan cerai segera dilaksanakan maka sebaiknya mengajukan gugatan pembagian harta bersama setelah adanya putusan cerai. Namun, jika ingin menghemat biaya peradilan dan sudah ada kesepakatan pasangan suami isteri untuk bercerai maka gugatan pembagian harta bersama sebaiknya diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian.

Pengadilan Agama berwenang memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di Pengadilan Agama Makassar menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang pasangannya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Sementara, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika tidak puas dengan putusan harta bersama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak mengetahui atau menerima putusan Pengadilan tingkat pertama.

Upaya yang dapat ditempuh jika pihak suami tidak mematuhi putusan Pengadilan tentang pembagian Harta bersama adalah:

1. Melakukan upaya musyawarah dengan pihak suami dan jika diperlukan melibatkan pihak keluarga suami atau isteri dalam musyawarah tersebut;
2. Mengajukan upaya eksekusi putusan harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ke Pengadilan yang berwenang.

Dalam hal ini LBH APIK Makassar sangat berperan aktif menghadapi bentuk ketidakadilan yang dilakukan suami terhadap istri. Ini bukti riil bahwa LBH APIK turun membantu kliennya dalam menghadapi suami-suami yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan sang istri dan anaknya.

Islam sangat mendukung kerja semua pihak yang tujuannya untuk kebaikan, jadi dalam hal ini LBH APIK Makassar sudah membantu pihak yang tertindas terkhusus pada istri yang mengalami ketidakadilan hingga tidak mendapatkan haknya.

Harta bersama dalam LBH APIK Makassar sama halnya dengan harta gono-gini dalam Islam. Di dalamnya tidak terdapat perbedaan. Menurut Rosmiati, setiap tahun kasus-kasus perempuan yang ditangani LBH APIK Makassar mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, kurang lebih 614 kasus perempuan secara keseluruhan.⁴⁸ Kasus paling tinggi yaitu kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berujung pada perceraian. Dari semua kasus perceraian tersebut, cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak.

Menurut beberapa perempuan yang menjadi klien dari LBH APIK Makassar mengungkapkan bahwa bantuan LBH APIK Makassar dalam menyelesaikan kasus perceraian sangat membantu. Dimana klien yang mengaku sama sekali tidak mengerti tentang hukum, maka dengan adanya LBH APIK Makassar yang membantu, yang bersangkutan diberi bimbingan oleh LBH APIK Makassar, mendampingi dalam persidangan serta mewakili yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan.⁴⁹

Selanjutnya menurut klien berikutnya yang diwawancarai penulis juga mengungkapkan rasa senangnya karena adanya LBH APIK Makassar dalam penyelesaian masalah perceraian. Menurutnya LBH APIK Makassar sangat

⁴⁸Rosmiati Sain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, wawancara di Kantor LBH APIK pada tanggal 18 November 2016.

⁴⁹Pengguna Jasa LBH APIK (30 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Makassar, 24 Desember 2016.

membantu. Setiap hari persidangan kasus perceraian, tidak perlu ada kekhawatiran karena pengacara yang disiapkan oleh LBH APIK Makassar selalu mendampingi dalam persidangan bahkan mewakili jika klien tidak dapat hadir.⁵⁰

Dari penjelasan di atas jelas bahwa LBH APIK tujuannya demi kemashlahatan. Dalam Islam kemashlahatan sangat diperhatikan karena perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan orang-orangnya pun modern dalam segi pemikiran. Banyak hal-hal yang tidak ada di zaman dahulu kemudian terjadi di zaman sekarang sehingga perlu pertimbangan kemashlahatan.

Adapun jumlah perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama kelas IA Makassar, yaitu:

TABEL 1
Jumlah Cerai Gugat dan Talak Se-Kota Makassar

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	2011	1,199	493	1,692
2	2012	1,238	567	1,805
3	2013	1,374	592	1,966
4	2014	1,499	569	2,068
5	2015	1,644	578	2,222
Total		6,954	2,799	9,753

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Jumlah perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar sejak tahun 2011 hingga 2015 meningkat. Pada tahun 2011 jumlah perceraian mencapai 1.692 kasus, pada 2012 meningkat menjadi 1.805 kasus, pada tahun 2013 juga meningkat menjadi 1.966 kasus, kemudian pada tahun 2014 mencapai 2.068 kasus dan pada tahun 2015 mencapai

⁵⁰Pengguna Jasa LBH APIK (31 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Makassar, 1 Desember 2016.

2.222 kasus. Sehingga total jumlah perceraian yang terjadi dan terdaftar di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar sejak 5 tahun terakhir mencapai 9.753. Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya betapa banyaknya permasalahan perempuan dalam kasus perceraian. Adapun perceraian yang telah ditangani oleh LBH APIK Makassar sebagai berikut:

TABEL 2
Jumlah Cerai Gugat dan Talak yang diperjuangkan LBH APIK Makassar

No	Tahun	Jumlah
1	2011	19
2	2012	
3	2013	22
4	2014	27
5	2015	69
Total		137

Sumber Data: Kantor LBH APIK Makassar

Data pada table 2 menggambarkan bahwa jumlah perceraian yang ditangani oleh LBH APIK Makassar selama 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2011 hingga 2015 mencapai kurang lebih 137 kasus. Dimana pada tahun 2011 sebanyak 19 kasus, sedangkan pada tahun 2012 tidak dapat diketahui jumlah dikarenakan data pada LBH APIK Makassar tidak tersedia. Kemudian pada tahun 2013 kasus perceraian yang ditangani LBH APIK Makassar sebanyak 22 kasus, kemudian pada tahun 2014 bertambah 5 sehingga mencapai 27 kasus. Akhirnya pada tahun 2015, kasus perceraian yang ditangani LBH APIK Makassar sangat meningkat sehingga mencapai 69 kasus. Selama lima tahun terakhir, kasus perceraian terbanyak yang ditangani LBH APIK Makassar yang terjadi pada tahun 2015. Adapun jumlah hak-hak perempuan yang diceraikan yang ditangani oleh LBH APIK Makassar yaitu :

TABEL 3
Jumlah Hak-Hak Perempuan Yang diperjuangkan LBH APIK Makassar

No	Hak-Hak Perempuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nafkah Iddah	19		22	27	69
2	Kiswah	19		22	27	69
3	Maskan	19		22	27	69
4	Nafkah Lampau	19		22	27	69
5	Nafkah Mut'ah	19		22	27	69
6	Hadanah (Hak Asuh Anak)/ Nafkah Anak					
7	Harta Bersama	19		22	27	69

Sumber Data: Kantor LBH APIK Makassar

Data Tabel 3 mengungkapkan bahwa LBH APIK Makassar telah memperjuangkan hak-hak perempuan yang diceraikan. Dimana LBH APIK Makassar memperjuangkan hak-hak perempuan yang diceraikan dengan menuangkannya dalam gugatan ataupun jawaban atas permohonan talak. Pada tahun 2011 terdapat masing-masing sebanyak 19 kasus perceraian dan dari ke 19 kasus tersebut dimasukkan pada setiap gugatan maupun rekonsvansi untuk permintaan berupa Nafkah Iddah, Kiswah, Maskan, Nafkah Lampau, Nafkah Mut'ah, serta Harta Bersama. Sedangkan pada tahun 2012, penulis menganggap bahwa LBH APIK Makassar tidak menangani kasus dikarenakan manajemen data tidak tersimpan dengan baik sehingga tidak ada arsip. Kemudian pada tahun 2013, terdapat masing-masing sebanyak 22 kasus perceraian dan dari ke 22 kasus tersebut dimasukkan pada setiap gugatan maupun rekonsvansi untuk permintaan berupa Nafkah Iddah, Kiswah, Maskan, Nafkah Lampau, Nafkah Mut'ah,

serta Harta Bersama. Begitupun pada tahun 2014 dan tahun 2015 dimasukkan pada setiap gugatan maupun rekonvensi untuk permintaan yang menjadi hak perempuan yang diceraikan dimana jumlahnya pada tahun 2014 sebanyak 27 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 69 kasus. Namun pada *Hadanah* (Hak Asuh Anak)/ Nafkah Anak pada setiap tahunnya tidak dapat diketahui dengan jumlah hak yang diperjuangkan, dikarenakan LBH APIK Makassar tidak memiliki jumlah data pada hak yang diperjuangkan ini.

TABEL 4
Jumlah Hak-Hak Perempuan yang Dikabulkan PA Makassar se-Kota Makassar

No	Hak-Hak Perempuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nafkah Iddah	1740	1734	1854	2077	2336
2	Kiswah	1740	1734	1854	2077	2336
3	Maskan	1740	1734	1854	2077	2336
4	Nafkah Lampau	1740	1734	1854	2077	2336
5	Nafkah Mut'ah	1740	1734	1854	2077	2336
6	Hadanah/Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak	3	7	5	5	14
7	Harta Bersama	15	10	20	7	18

Sumber Data: Kantor Pengadilan Kelas IA Makassar

Adapun Data pada Tabel 4 merupakan jumlah hak-hak yang diperjuangkan dipengadilan Agama Kelas IA Makassar. Pada tahun 2011 jumlah nafkah iddah, kiswah, maskan, nafkah lampau dan nafkah mut'ah masing-masing sebanyak 1740 kasus, dimana jumlah kasus yang perceraian pada tahun 2011 sebanyak 1740. Pada kasus perceraian tersebut sudah *include* dengan gugatan hak-hak perempuan yang

diceraikan. Begitupun pada tahun 2012 sebanyak 1734 kasus perceraian *include* dengan gugatan nafkah iddah, kishwah, maskan, dan nafkah lampau. Pada tahun 2013 sebanyak 1854 kasus perceraian *include* dengan gugatan nafkah iddah, kishwah, maskan, dan nafkah lampau. Pada tahun 2014 sebanyak 2077 kasus perceraian *include* dengan gugatan nafkah iddah, kishwah, maskan, dan nafkah lampau. Kemudian pada tahun 2015 sebanyak 2336 kasus perceraian *include* dengan gugatan nafkah iddah, kishwah, maskan, dan nafkah lampau. Sedangkan pada kasus Hak Asuh Anak/hadanah dan Nafkah anak yang diperjuangkan tersendiri yaitu pada tahun 2011 sebanyak 3, 2012 sebanyak 7, 2013 sebanyak 5, 2014 sebanyak 5, dan 2015 sebanyak 14. Dan harta bersama pada tahun 2011 sebanyak 15, 2012 sebanyak 10, 2013 sebanyak 20, 2014 sebanyak 7 dan 2015 sebanyak 18.

TABEL 5
Jumlah Hak-Hak Perempuan yang Dikabulkan PA Makassar atas Perjuangan LBH
APIK Makassar

No	Hak-Hak Perempuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nafkah Iddah	19		22	27	69
2	Kishwah	19		22	26	69
3	Maskan	19		22	25	69
4	Nafkah Lampau	17		19	25	67
5	Nafkah Mut'ah	19		22	27	69
6	Hadanah/Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak					
7	Harta Bersama	18		22	27	69

Sumber Data: Kantor Pengadilan Kelas IA Makassar dan LBH APIK Makassar

Data Tabel 5 pada tahun 2011 Hak-hak Perempuan yang dikabulkan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yaitu Nafkah iddah sebanyak 19, Kishwah 19, Maskan 19, Nafkah lampau 17, Nafkah Mut'ah 19, dan Harta bersama 18. Pada tahun 2012, penulis menganggap bahwa LBH APIK Makassar tidak menangani kasus dikarenakan manajemen data tidak tersimpan dengan baik sehingga tidak ada arsip. Pada tahun 2013 Hak-hak Perempuan yang dikabulkan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yaitu Nafkah iddah sebanyak 22, Kishwah 22, Maskan 22, Nafkah lampau 19, Nafkah Mut'ah 22, dan Harta bersama 20. Pada tahun 2014 Hak-hak Perempuan yang dikabulkan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yaitu Nafkah iddah sebanyak 27, Kishwah 26, Maskan 25, Nafkah lampau 27, Nafkah Mut'ah 27, dan Harta bersama 27. Sedangkan pada tahun 2015 Hak-hak Perempuan yang dikabulkan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yaitu Nafkah iddah sebanyak 69, Kishwah 69, Maskan 69, Nafkah lampau 67, Nafkah Mut'ah 69, dan Harta bersama 65. Namun pada *Hadanah* (Hak Asuh Anak)/ Nafkah Anak pada setiap tahunnya tidak dapat diketahui dengan jumlah hak yang diperjuangkan, dikarenakan LBH APIK Makassar tidak memiliki jumlah data pada hak yang diperjuangkan ini. Pada tahun 2011 hak-hak yang tidak terkabulkan sesuai dengan yang diperjuangkan LBH APIK yaitu nafkah lampau dikarenakan pihak mantan suami tidak mampu membayarnya. Begitupun dengan harta bersama pada tahun 2011 tidak terkabulkan dikarenakan harta yang digugat merupakan harta bawaan dari mantan suami. Pada tahun 2013, dengan pertimbangan yang sama bahwa nafkah lampau tidak dikabulkan dikarenakan ketidakmampuan mantan suami, dimana penghasilan mantan suami tidak sesuai dengan yang diinginkan klien. Dengan dengan pertimbangan yang sama pada tahun 2015 nafkah lampau juga tidak dapat terkabulkan semua. Sedangkan pada tahun 2014 Kishwah, Maskan dan Nafkah lampau tidak dikabulkan dengan pertimbangan bahwa mantan suami tidak mampu, dimana selama masa pernikahan para

klien dan mantan suami tidak memiliki rumah tetap melainkan tinggal bersama di rumah kontrakan.

Seperti yang Rosmiati Sain selaku direktur telah jelaskan bahwa terkait hak-hak perempuan bercerai yang diperjuangkan oleh LBH APIK telah terwujud, menurutnya hampir semua hak-hak yang diperjuangkan terwujud sesuai dengan apa yang tertuang dalam gugatan klien maupun jawaban permohonan cerai oleh suami. Hanya yang menjadi kendala dalam memperolehnya adalah meski dalam putusan pengadilan menyebutkan nominal jumlah sekian banyak yang menjadi hak dari mantan istri, namun sulit untuk mewujudkan secara langsung. hak-hak tersebut sudah dijelaskan sebelumnya seperti nafkah iddah, nafkah lampau, kiswah, hadanah, maupun harta bersama. Apalagi dalam bentuk materi seperti uang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang mengikat untuk memaksakan mantan suami membayar. Sehingga klien kadang mengikhhlaskan saja, yang jelas sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan dengan mantan.⁵¹

Selanjutnya Anwar Saleh menjelaskan bahwa selama ini LBH APIK memang banyak mendampingi beberapa perempuan-perempuan dalam memperjuangkan haknya dalam persidangan perceraian. Bukan hanya kasus perceraian yang ditangani, juga beberapa kasus lainnya seperti warisan, hadanah, maupun harta bersama. Menurutnya, LBH APIK kadang mempersulit hakim memutuskan sebuah perkara dikarenakan terlalu banyak menuntut hak-hak klien. Meskipun itu menjadi hak-hak kliennya, namun banyak yang tidak bisa diwujudkan jika si suami tidak mampu.⁵²

⁵¹Rosmiati Sain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, wawancara di Kantor LBH APIK pada tanggal 18 November 2016.

⁵²Anwar Saleh, Hakim, di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar pada tanggal 1 Desember 2016.

Dari beberapa pengguna jasa LBH APIK Makassar yang memperoleh bantuan dari LBH APIK Makassar mengaku sangat puas. Meskipun dalam putusan telah disebutkan bahwa mantan suami harus membayar sekian minimal maupun maksimal yang dibayarkan sebagai hak dari perempuan yang diceraikan, namun mereka lebih banyak tidak memperolehnya. Mereka merasa puas karena setidaknya mereka terlepas dari ikatan yang memaksa mereka tetap harus tunduk dan patuh pada suami yang tidak lagi mencintai mereka. Hal tersebut juga telah dijelaskan di atas bahwa dikarenakan tidak adanya aturan yang mengikat untuk memaksakan mantan suami membayar. Sehingga pengguna jasa LBH APIK Makassar kadang mengikhhlaskan saja, yang jelas sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan dengan mantan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian-uraian dari bab awal sampai bab akhir, berikut ini adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan-pembahasan yang terdahulu yaitu:

1. Peranan LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan Hak-Hak Perempuan yang telah bercerai menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan Hukum.
2. Bentuk peran LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di kota Makassar yaitu :
 - a. Litigasi
 - b. Semi Litigasi
 - c. Non Litigasi
3. Hak-Hak yang telah bercerai diperjuangkan LBH APIK di kota Makassar yaitu:
 - a. Nafkah Iddah
 - b. Nafkah lampau
 - c. Nafkah Mut'ah
 - d. Nafkah Kiswa
 - e. *Hadanah*/Hak Asuh Anak
 - f. Mewakili Hak Anak, dan
 - g. Harta bersama.

B. Implikasi Penelitian

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang fokus dalam memperjuangkan hak-hak

perempuan, diharapkan agar apa yang menjadi hak-hak perempuan yang bercerai dapat terwujud sepenuhnya. Namun pada kenyataannya, hak-hak tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh LBH APIK Makassar karena belum adanya regulasi yang mengatur mantan suami harus memenuhi nominal-nominal biaya nafkah yang tercantum dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengatur lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti nominal nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami sebagai dasar hakim menetapkan putusan. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga harus mengatur bahwa setiap nominal yang dikabulkan oleh hakim wajib dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri, jika tidak membayar akan diberikan sanksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordova, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Abd. Hakim, dkk., *Metodologi Studi Islam*. Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- A.M Saefuddin dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terj. Oleh Moch. Anwar, dkk., Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ali, Muhammad dalam Yulmiati, *Penerapan Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik pada SD Islam Terpadu Wihdatul Ummah Makassar*, Tesis: Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aqsa, Alghifari dkk., *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran tentang Konflik dan Bantuan hukum Struktural)*, Jakarta: LBH Jakarta, 2015.
- Dahlan, Abdl Aziz et. Al (ed). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PRESS PONOROGO, 2010.
- Endarmoko, Eko, *The Saurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hasan, Muhammad Tolchah et al., *Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- Hermansyah, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*, Journal Pemerintahan Integratif, 2015.

- Kodir, Faqihuddin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. II, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2012.
- Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*, Bandung: Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi -Univ.Kristen Maranatha, 2009.
- M.B. Ali dan T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, edisi revisi, Cet. XXXI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Satori, Djam'an et al., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah 13-terjemahan*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Soekonto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet.XVI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2005.
- Supardjaja, Komariah Emong, et al., *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-hak Perempuan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasionaldepartemen Hukum Dan HAM, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo , 2000.
- Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- <http://lbhapikmakassar.org/data-base/8-tentang-kami.html>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Pemeriksaan Data-Data pemenuhan Hak-Hak perempuan Yang Diperjuangkan LBH APIK Makassar Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar



Pemeriksaan Berkas dan bukti Oleh TIM Pengacara LBH APIK Makassar Sebelum Proses Persidangan Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Di Pengadilan
Agama Kelas IA Makassar



Wawancara dengan klien LBH APIK Makassar di Kediaman Klien di Makassar



Tim Pengacara LBH APIK Makassar Mewakili Klien dalam Menghadiri Proses
Persidangan Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar



Konsultasi Sekaligus Pembuatan Jawaban Permohonan Talak oleh Tim
Pengacara LBH APIK Makassar Sebelum Proses Persidangan Di Pengadilan
Agama Kelas IA Makassar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap **Mariani** lahir di Kalempang 10 Oktober 1989 Dari pasangan Almarhum ayahanda La Tamma dan Almarhumah Ibunda Senong. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN No. 3 Betao, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, 1995-2001, menamatkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Maiwa, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, 2001-2004, menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Maiwa, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang 2004-2007,

Menamatkan program sarjana, Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008-2013, kemudian melanjutkan Program Magister di UIN Alauddin Makassar 2014 sampai sekarang. Riwayat Pekerjaan sebagai Staf Pelaksana Teknis di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan sejak Agustus sampai Desember 2013, kemudian sebagai Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengalaman Organisasi selama Kuliah sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam 2009-2013, Pengurus Asosiasi Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin (AMPUH) 2011-2012, Human Illumination 2010-Sekarang.

Karya-karya ilmiah yang dihasilkan yaitu:

1. Pembagian Gaji pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Skripsi)
2. Sanksi Pidana Bagi Pegedar Narkoba da Pelaku Korupsi Perspektif hukum Islam (Makalah)
3. Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Makalah)